

**SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI DUNIA MODERN
(STUDI KRITIS TERHADAP PANDANGAN ORGANISASI
KHILAFATUL MUSLIMIN BANDAR LAMPUNG)**



**Diajukan untuk memenuhi Tugas-Tugas dan syarat-syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**

Oleh :

KARISMA DESTI RESKIKE

NPM. 1521020130

Program Studi : Siyasah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440H/2019M**

**SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI DUNIA MODERN
(STUDI KRITIS TERHADAP PANDANGAN ORGANISASI
KHILAFATUL MUSLIMIN BANDAR LAMPUNG)**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi Tugas-Tugas dan syarat-syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**

Oleh :

KARISMA DESTI RESKIKE

NPM. 1521020130

Program Studi : Siyasah

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Ahmad Ngisomudin, S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440H/2019M**



ABSTRAK

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI DUNIA MODERN (STUDI KRITIS TERHADAP PANDANGAN ORGANISASI KHILAFATUL MUSLIMIN BANDAR LAMPUNG)

Oleh
Karisma Desti Reskike

Khilafatul Muslimin adalah salah satu fenomena di antara berbagai gerakan Islam yang muncul di Indonesia. Gerakan ini mulai masuk dan berkembang sejak 13 Rabi'ul Awwal 1418 H atau bertepatan dengan 18 Juli 1997 M di Indonesia. Apabila dilihat dari segi umur gerakan ini sudah cukup lama hanya saja tidak begitu ekstrem, sehingga tidak dianggap berbahaya oleh pemerintah. Akan tetapi perkembangan telah merambah ke beberapa wilayah di Indonesia. Gerakan ini bercita-cita menegakkan Syari'at Islam dan mendirikan sistem Khilafah serta meletakkan dan memilih Islam sebagai prinsip ideologi. Gerakan ini memilih jalur dakwah dalam memperjuangkan kembali berdirinya sistem kekhilafahan.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana pandangan kritis terhadap Konsep Pemerintahan dalam ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin? dan Bagaimana relevansi ajaran Khilafatul Muslimin dengan situasi politik atau pemerintahan di Indonesia?. Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu untuk mengkaji secara kritis apakah konsep pemerintahan dalam ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin tersebut, masih tepat dan benar atau tidak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan teori Yusuf Al-Qardhawi dan Gus Dur yang telah menyesuaikan perkembangan zaman modern atau kontemporer. Penelitian ini melalui pengumpulan bahan dari lapangan (*field research*) seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Sifatnya deskriptif analisis.

Analisis kritis menyimpulkan bahwa cita-cita Khilafatul Muslimin menegakkan Sistem Pemerintahan Islam tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena tidak cocok dengan kemajemukan masyarakat di Indonesia. Selain akan mengabaikan keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan, serta perjuangan pahlawan terdahulu. Alasan yang paling utama adalah tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak ada pendapat baku tentang mewajibkan mendirikan Negara Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, hanya menjelaskan kepemimpinan Islam saja.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung. Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Karisma Desti Reskike
Npm : 1521020130
Jurusan : Siyasa
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Sistem Pemerintahan Islam di Dunia Modern (Studi Kritis terhadap Pandangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Mamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

Pembimbing II

Ahmad Ngisomudin, S.Ag., M.Ag.

NIP.196806112000031002

Ketua Jurusan Siyasa

Irs. Susiadi As., M.Sos.I

NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, Tlp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI DUNIA MODERN (STUDI KRITIS TERHADAP PANDANGAN ORGANISASI KHILAFATUL MUSLIMIN BANDAR LAMPUNG)”** disusun oleh : **Karisma Desti Reskike, NPM. 1521020130**, Jurusan : **Siyasah**, telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Hari/Tanggal: **Senin, 29 April 2019**

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Penguji I : Drs. Henry Irwansyah, M.A.

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴿١٧﴾

“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang penolongpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya”.

(QS. Al-Kahfi [18] : 17)¹



¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta Timur: PT Suara Agung, 2010), h. 574.

PERSEMBAHAN

Dengan Keridhoan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Risman dan Ibu Soleha, dua insan tercintaku, yang selalu menyayangi, mendidik, dan membimbingku tanpa ada kata lelah dan putus asa. Penyemangat utamaku dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Saudara Kandung yang ku sayangi : Karisma Novita Sari (kakak ku), dan dua adikku : Kharisma Dika Saputra, dan Kharisma Apri Irencia. Mereka pula penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ayuk sepupu tika Liana dan suaminya tengku Yusvin Argunan, selalu menyayangiku seperti anak sendiri. Papah Henri Buchori, Bunda Madaria Ivonie, ngah aya, nda yuli, dan yang lainnya.
4. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung, Pada Tanggal 03 Desember 1997 anak kedua dari empat bersaudara, anak dari Pasangan Bapak Risman dan Ibu Soleha.

Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Sayang Ibu, Natar, Lampung Selatan, selesai pada tahun 2003, Sekolah Dasar Negeri 01 Natar, Lampung Selatan, selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mutiara Natar, Lampung Selatan, selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Mutiara Natar, Lampung Selatan, selesai pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, April 2019
Penulis

Karisma Desti Reskike
1521020130

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) yang penulis beri judul **“SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI DUNIA MODERN (STUDI KRITIS TERHADAP PANDANGAN ORGANISASI KHILAFATUL MUSLIMIN BANDAR LAMPUNG)”** shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang insya Allah mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi, M.Sos.I selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.

4. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan membimbing dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Ahmad Ngisomudin, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang ikhlas meluangkan waktunya, memberikan pengarahan dan memberikan masukan-masukan dalam penulisan karya ilmiah ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
7. Sahabat seperjuangan Siyasah C 2015 yang telah banyak memberikan warna kehidupan dalam perkuliahan penulis, memberikan semangat dan ide-ide baru sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.
8. Komunitas Mata Pena Fakultas Syariah, Bapak Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H sebagai pembimbing yang telah membuka dan memberikan kesempatan lebih luas untuk menyelam di dunia literasi, juga sahabat-sahabat seperjuangan Ria Rhisthiani, Thiara Pareza, Rizki Idsam Matura, Popi, Hanivah dan keluarga Mata Pena lainnya terima kasih atas setiap cerita yang telah tergoreskan bersama.
9. Sahabat yang selalu memotivasi dan memberi semangat, Olsa Krui Saputri, Yoani Rakhma Amalia, Ana Kasiani, Barokah Inayah Muslim, Devi Apriani, Meri Kurniati, Tuti Angreni, Mei Suryani, Adi Saputra, Alfa Ridho, M. Khomsi J, Desti Nurtiasih, Mega Lailatul H, Tuti Angreni, dan Ririn.
10. PPS Akselerasi kelompok 2, Yunnita, S.H., Mei Suryani, S.H., Desti Nurtiasih, S.H., Cindi Melani, S.H., Rita Putri Andini, S.H., Endang

Supriyani, S.H., Abdillah Afandi, S.H., Saiful Nugraha, S.H., Ahmad Windo

Adenensi, S.H., Hilmi Yusro Rofi'i, S.H., Syahfiqti Nugraheni, S.H.

11. Sahabat seperjuangan kepengurusan keputrian Al-Ittihad 2018.
12. Bapak Frenki, S.E.I., M.Si. selaku Sekretaris jurusan Siyasah.
13. Bapak Muhammad Irfan, S.Ag., M.Kom.I. yang ikut andil dalam kepengurusan jurusan Siyasah.
14. Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
15. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari serta jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita harapkan segera keridhaan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, April 2019

Karisma Desti Reskike
1521020130

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ISLAM DAN NEGARA	
A. Konsep Negara dalam Islam	
1. Pengertian Negara Menurut Islam	19
2. Peran Agama dan Negara	21
3. Islam sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara	23
4. Prinsip-prinsip bernegara dalam Islam	28
5. Tugas dan Tujuan Pemerintahan dalam Islam	29
6. Bentuk Negara dalam Sistem Pemerintahan Islam	30
B. Munculnya Pemikiran tentang Islam sebagai Dasar Negara di Indonesia	38
C. Sistem-sistem Pemerintahan Era Modern dan Indonesia	
1. Sistem Tata Negara di Indonesia	46
2. Keragaman suku, agama, ras dan antargolongan di Indonesia	47
D. Ciri dan Karakteristik Madrasah Moderat	
1. Percaya kepada Hikmat Syariat yang Mengandung Kemaslahatan.....	55
2. Menggabungkan Teks dan Hukum Syariat	56
3. Memandang dengan Adil Terhadap Urusan Agama dan Dunia	57

4. Menyambungkan Teks dengan Realita Kehidupan	58
5. Memudahkan Manusia	59
6. Terbuka, Dialog, dan Toleran terhadap Dunia	60

BAB III SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT KHILAFATUL MUSLIMIN

A. Latar Belakang, Tujuan dan Perkembangan Khilafatul Muslimin.....	62
B. Negara Islam dan Khilafah Menurut Khilafatul Muslimin	73
C. Ajaran-ajaran Khilafatul Muslimin	82
1. Bai'at	82
2. Jihad	87
3. Kewajiban Penerapan Syar'iat Islam di Indonesia.....	91
4. Dasar-dasar Pemerintahan Islam dan Ideologinya	96
5. Berjamaah menurut Khilafatul Muslimin	104
6. Hubungan Internasional menurut Khilafatul Muslimin	106

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Kritis terhadap Konsep Pemerintahan dalam ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin	112
B. Relevansi ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin dengan situasi politik atau pemerintahan di Indonesia	122

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	128
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR STRUKTUR

Struktur	Halaman
Struktur. 1 Struktur Kekuasaan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung.....	94
Struktur. 2 Struktur Perkembangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung.....	95



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas pokok permasalahan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul skripsi ini adalah “**Sistem Pemerintahan Islam di Dunia Modern (Studi Kritis terhadap Pandangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung)**”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. **Sistem** adalah sekumpulan komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berkaitan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.² Sedangkan, **Pemerintahan Islam** yaitu sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu yang berpedoman kepada ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.³ Maka, **Sistem Pemerintahan Islam** adalah sekumpulan orang-orang dibawah kepemimpinan seorang pemimpin (*Khalifah*) yang memiliki kekuasaan untuk saling bekerjasama antara pemimpin dengan orang-orang yang ada dibawah kepemimpinannya untuk mencapai suatu tujuan dengan menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman dari ajaran Islam.

¹Jogianto H.M, *Analisis dan Disain Sistem Informasi*, (Jogyakarta :Raja Grafindo, 2001)., h.2

²C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta :Bumi Aksara, 2005)., h.7

2. **Studi** adalah pelajaran; penyelidikan; tempat belajar.⁴ Sedangkan, **Kritis** adalah genting; gawat; akut; tajam/tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian; secara mendalam; tanggap dan mampu melontarkan kritik-kritik.⁵ Maka, **Studi Kritis** adalah suatu penyelidikan dalam menanggapi atau memberikan penilaian secara tajam/tegas dan teliti.
3. **Pandangan** adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya), benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya), pengetahuan, pendapat.⁶
4. **Organisasi** adalah penyusunan dan pengaturan bagian-bagian hingga menjadi satu kesatuan; susunan aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan yang teratur; gabungan kerja sama (untuk mencapai tujuan tertentu).⁷
5. **Khilafatul** berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *Kholafahu*, *Khilaafatun*, dan dalam bahasa Inggris *to come after* yang artinya menggantikan seseorang.⁸ Sedangkan, **Muslimun/muslimin** artinya orang-orang yang berserah diri kepada peraturan Allah dengan sepenuh pengabdian.⁹ Maka, **Khilafatul Muslimin** adalah suatu kelompok yang terdiri atas kaum Muslim dan non-Muslim yang didalamnya memiliki tujuan dan hanya ada satu pemimpin yang diyakini pengikutnya sebagai

³Budiono, “*Kamus Ilmiah Populer Internasional*”, (Surabaya : Alumni, 2005), h. 616

⁴*Ibid*, h. 346

⁵“jagokata.com” (On-line), tersedia di: <https://jagokata.com/arti-kata/pandangan.html> (12 Januari 2019).

⁶Budiono, *Op.Cit*, h. 458

⁷Yan Tirtobisono dan Ekrom Z, “*Kamus Arab Inggris Indonesia*”, (Surabaya : Apollo Lestari, tt), h.212

⁸Ahsin W. Al-Hafidz, “*Kamus Ilmu Al-Qur'an*”, (Jakarta : Amzah, 2012), h.205

penerus yang menggantikan tugas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Islam di bawah sistem pemerintahan dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang penulis maksud dengan judul : “Sistem Pemerintahan Islam di Dunia Modern (Studi Kritis terhadap Pandangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung)”, adalah untuk melihat upaya dalam menegakkan Sistem Pemerintahan Islam menurut Perspektif Khilafatul Muslimin.

B. Alasan Memilih Judul

Sebagai alasan yang mendorong memilih judul “Sistem Pemerintahan Islam di Dunia Modern (Studi Kritis terhadap Pandangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung)”, adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, namun sistem pemerintahannya menerapkan sistem demokrasi. Diantara kaum muslim di Indonesia terdapat organisasi yang dikenal dengan Khilafatul Muslimin yang ingin menerapkan sistem pemerintahan dalam bentuk sistem pemerintahan Islam karena itulah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Alasan Subjektif

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara lebih terperinci, karena adanya relevansi permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

C. Latar Belakang Masalah

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹⁰ Sedangkan Islam adalah wahyu atau risalah yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya untuk menjadi pedoman bagi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹¹ Di samping itu, Islam juga bukan agama yang berat sebelah ke akhirat atau ke dunia saja.

Adapun negara dalam pengertian Islam adalah alat atau penghubung untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹² Karena negara adalah alat bagi negara untuk menegakan syari'at Islam dalam segala aspek. Sebagian muslim meyakini *syari'ah* sebagai suatu sistem hukum kehidupan universal yang mengatur segala persoalan kehidupan manusia dari persoalan personal hingga persoalan konsepsi kehidupan komunal. Maka bagi mereka, mendirikan negara Islam menjadi sebuah kewajiban bagi kaum muslim.

Dikursus Negara Islam atau al-Daulah al-Islamiyah sendiri sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Akan tetapi istilah Negara Islam baru mulai populer pada abad ke-20, tepatnya sejak didirikannya Pakistan sebagai Negara Islam.¹³ Dewasa ini, dikursus ini telah menjadi isu hangat yang

⁹A Ubaedillah, Abdul Rozak, *Pancasila., Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, 2015), h.120

¹⁰Thoyib I.M, Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.23

¹¹Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 18

¹²Fuad M. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h.17

diperdebatkan oleh para pemikir Islam sampai saat ini dan belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Bahkan diskusi ini semakin hangat, ketika antusiasme melanda hampir seluruh dunia.

Oleh karena itu, tiada kata berakhir dalam membahas Negara Islam. Selalu menarik untuk diperbincangkan, bahkan dikaji secara mendalam. Berdiskusi tentang Negara Islampun, menjadi salah satu solusi dalam penambahan wawasan agar semakin luas pemahaman. Tentunya, berdiskusi dengan seorang pengkaji yang sudah banyak membaca dan paham dalam pembahasan yang ingin didiskusikan.

Sepanjang sejarah perkembangan Islam, ada dua pandangan dalam memahami negara Islam; pemikiran idealistik dan pemikiran realistik, sebagaimana Abdurahman Wahid, menguraikan:

“ . . . Tidak adanya bentuk baku dalam sebuah negara dan proses pemindahan bentuk kekuasaan dalam bentuk tetap yang ditinggalkan Rasulullah, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, membuat perubahan historis atas bangunan negara yang ada menjadi tidak terelakkan atau tercegah lagi. Dengan kata lain, kesepakatan dalam bentuk negara tidak dilandaskan pada dalil naqli, melainkan pula kebutuhan masyarakat sewaktu waktu”.¹⁴ Hubungan agama dan negara dalam konteks dunia Islam masih menjadi perdebatan yang intensif di kalangan para

¹³Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyashah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h.178

pakar Muslim hingga kini. Wacana ini mendiskusikan bagaimana posisi agama dalam konteks negara modern (*nation state*).”¹⁵

Hubungan agama dan negara di Indonesia pun mengalami pendikotomian atau pembagian dalam dua bagian yang saling bertentangan terhadap definisi negara Islam. Perdebatan tentang Islam dan nasionalisme Indonesia antara tokoh nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler pada 1920-an merupakan babak awal pergumulan Islam dan negara pada kurun-kurun selanjutnya. Tulisan-tulisan tentang Islam dan watak nasionalisme Indonesia menghiasi surat kabar pergerakan nasional pada waktu itu, menanggapi pandangan dan paham sekuler yang dilontarkan kalangan tokoh nasionalis sekuler. Perdebatan Islam dan nasionalisme dan konsep negara sekuler diwakili masing-masing oleh tokoh nasionalis Muslim Mohammad Natsir dan Soekarno dari kelompok sekuler.¹⁶ Perjalanan sejarahnya juga mengalami dialektika sejarah yang cukup panjang. Sejak berdirinya negara ini, Islam secara tidak langsung telah terlibat dalam politik. Asal-usul perkembangan diskursus politik Islam ini bisa ditelusuri sejak tahun-tahun pertama munculnya pergerakan nasional mengenai peranan Islam di negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan. Salah satu perbedaan pendapat yang menjadi permasalahan pada saat itu adalah apakah negara ini akan mengambil corak “Islam” atau “Nasionalis”.

Konsep kenegaraan pertama mengkehendaki agar Islam diakui dan diterima sebagai dasar dan ideologi negara, karena sifatnya yang holistik dan dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Akan tetapi, kelompok nasionalis sekuler

¹⁴A Ubaedillah, Abdul Rozak, *Op.cit*, h. 131

¹⁵*Ibid*, h.135

tidak menyepakatinya. Perdebatan Islam dan konsep-konsep ideologi sekuler menemukan titik klimaksnya pada persidangan formal dalam sidang-sidang majelis Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bentukan pemerintah Jepang pada 1945. Para tokoh nasional Muslim seperti H. Agus Salim, K.H. Mas Mansur, dan K.H. Wachid Hasyim, menyuarkan suara aspirasi Islam dengan mengajukan usul konsep negara Islam dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara bagi Indonesia merdeka. Usulan menjadikan Islam sebagai konsep negara dari kelompok nasionalis Muslim bersandar dari alasan sosiologis bangsa Indonesia yang mayoritas memeluk Islam sebagai agama dan keyakinannya.

Alasan kelompok nasionalis Muslim ini ditentang oleh kalangan nasionalis sekuler yang mengajukan konsep negara sekuler. Menurut para nasionalis sekuler, kemajemukan Indonesia dan perasaan senasib melawan penjajah mendasari alasan mereka menolak konsep negara agama (Islam) yang diajukan oleh kalangan nasionalis Muslim. Bagi mereka, Indonesia yang majemuk baik agama, suku, dan bahasa harus melandasi berdirinya negara non agama (sekuler). Pada kesempatan perhelatan konstitusional ini, tokoh nasionalis sekuler Soekarno merujuk pengalaman Turki Modern di bawah Kemal Attaturk dengan konsep negara sekulernya. Lebih lanjut, Soekarno kembali menyuarkan konsep sekulernya tentang lima dasar negara Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Pancasila.¹⁷

Khilafatul Muslimin adalah salah satu fenomena di antara berbagai gerakan Islam yang muncul di Indonesia. Gerakan ini mulai masuk dan

¹⁶*Supra* catatan kaki nomor 15

berkembang sejak 13 Rabi'ul Awwal 1418 H atau bertepatan dengan 18 Juli 1997 M di Indonesia.

Sistem pemerintahan khilafah, khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi saw.¹⁸ Sistem pemerintahan yang dijadikan referensi oleh Khilafatul Muslimin adalah sistem yang berbentuk Kekhalifahan, dimana berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, disini penulis akan menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan Islam yang menjadi cita-cita organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung yakni sistem khilafah. Jika diterapkan di suatu wilayah tertentu sama saja memaksakan sebuah perubahan bentuk negara. Sedangkan, dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada bentuk baku tentang wajib tegaknya negara Islam dalam suatu wilayah tertentu. Dalam wilayah Indonesia tidak cocok diterapkan sistem pemerintahan Islam karena akan menciderai kemajemukan yang ada. Selain itu, dalam pasal 37 ayat 5 menegaskan bahwa "Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Artinya dengan alasan apapun tidak dapat melakukan perubahan sistem yang ada, yakni dari sistem demokrasi menjadi sistem pemerintahan Islam. Meskipun, mayoritas penduduk muslim.

¹⁷Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), h.205

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan kritis terhadap Konsep Pemerintahan dalam ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin?
2. Bagaimana relevansi ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin dengan sistem politik atau pemerintahan di Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan kritis terhadap Konsep Pemerintahan dalam ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin.
- b. Untuk menggambarkan secara jelas relevansi ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin dengan sistem politik atau pemerintahan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang terkait pembahasan dalam skripsi ini.
- b. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbang pemikiran terkait dengan upaya penegakan Sistem Pemerintahan dalam Islam menurut organisasi Khilafatul Muslimin yang telah sesuai atau tidak dengan Al-Qur'an dan As-sunnah, tentunya dikaji secara kritis dalam konteks Dunia Modern.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.¹⁹

1. Jenis dan Sifat

a. Jenis Penelitian

Menurut jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²⁰ Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang Sistem Pemerintahan dalam Islam, termasuk juga data primer hasil *interview* penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Jadi, untuk mendapatkan informasi tentang Sistem Pemerintahan Islam di Dunia Modern (Studi Kritis terhadap Pandangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung), penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam mengupayakan tegaknya Sistem Pemerintahan Islam oleh pemimpin dan jajaran penting di Khilafatul Muslimin secara bebas dan terpimpin. Bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas namun masih dipimpin oleh kerangka pertanyaan.

¹⁸Wardi Bahtiar, *Metode Ilmu Dakwah*, (Jakarta ; Logos cet 1, 1997), h.1

¹⁹Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015), h.10.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis.²¹

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.²² Penulis akan menganalisis tentang Sistem Pemerintahan Islam di Dunia Modern (Studi Kritis terhadap Pandangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung).

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dan objek yang diteliti.²³

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Objek atau nilai yang diteliti dalam sampel disebut unit sampel. Unit sampel mungkin sama dengan unit analisis, tetapi mungkin juga tidak.²⁴ Tujuan penelitian mengambil sampel

²⁰M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h.63

²¹*Ibid*, h. 66

²²Sedermayati, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung : Mandar Maju, cet 1, 2002), h.121

²³M. Iqb Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 58

ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Sampel yang dipakai dalam penelitian adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive sampling* juga disebut *judgmental sampling*, yaitu pengambilan sampling berdasarkan “penilaian atau (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karenanya agar tidak sangat objektif, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. Kriteria yang pantas dijadikan sampel pada penelitian ini adalah :

- a. Ketua Umum / *Khalifah*
- b. Amir Wilayah Lampung Selatan.
- c. Khatib/Sekretaris Khilafatul Muslimin

3. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Dalam hal ini penulis akan menggabungkan sumber data dari pemimpin dan seseorang yang juga mempunyai jabatan selain pemimpin.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai

literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Penulis akan mengumpulkan literature serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Islam di Dunia Modern (Studi Kritis terhadap Pandangan Khilafatul Muslimin Bandar Lampung).

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan tehnik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.²⁵

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁶ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁷ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.402.

²⁵Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Stim Ykpn, 2008), h.70.

²⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 137

muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.²⁸ Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang upaya berdirinya Sistem Pemerintahan Islam perspektif Khilafatul Muslimin, penulis melakukan wawancara dengan pihak berikut ini: 1) Ketua Umum/ *Khalifah*, 2) Amir Wilayah Lampung Selatan, 3) Khatib/Sekretaris Khilafatul Muslimin.²⁹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁰ Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses dalam mengupayakan berdirinya Sistem Pemerintahan Islam perspektif Khilafatul Muslimin Bandar Lampung, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca referensi terkait.

Oleh sebab itu, dokumentasi menjadi tehnik pengumpulan data yang sangat dibutuhkan saat penelitian berlangsung. Dokumentasi pun,

²⁷*Ibid*, h. 138

²⁸Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.

²⁹Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h.83.

menjadi salah satu faktor pendukung yang dianjurkan saat penelitian skripsi.

5. Analisa Data

Data dianalisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan penelitian pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan. Analisa data ini menggunakan instrument analisis deduktif.

Metode Deduktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju suatu kaedah yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum ada dalam nash dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis pandangan Khilafatul Muslimin tentang Sistem Pemerintahan dalam Islam.

Metode Induktif, yakni cara berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.³¹ Artinya ketentuan-ketentuan khusus yang ada dalam Undang-undang dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis secara kritis terhadap sistem pemerintahan dalam konsep Khilafatul Muslimin Bandar Lampung dan ketepatan sikap Khilafatul Muslimin tentang penerapan Sistem Pemerintahan versi Khilafah di Indonesia.

³⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 21

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang masing-masing diperinci secara sistematis dan saling terkait. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang berisi Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab pendahuluan ini dimaksudkan agar dapat diketahui garis besar dari penelitian ini bagi yang membacanya.

Bab *kedua*, membahas Tinjauan Umum tentang Islam dan Negara, yang membahas tentang Konsep Negara dalam Islam secara umum. Pembahasan yang lebih lanjut akan dibahas dalam Pengertian Negara menurut Islam dan Islam sebagai Dasar Negara. Selain itu, sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Sistem Pemerintahan Islam di Dunia Modern (Studi Kritis terhadap Pandangan Khilafatul Muslimin Bandar Lampung), maka sangat perlu kiranya untuk menguraikan sejarah tentang pemikiran Islam sebagai dasar negara yang muncul di Indonesia dan lebih lanjut menjelaskan juga terkait dengan sistem-sistem pemerintahan era modern dan Indonesia.

Bab *ketiga*, Sejarah Perkembangan Gerakan Khilafatul Muslimin, yang akan menguraikan lebih jauh yang menjadi Latar Belakang munculnya gerakan ini serta tujuan berdirinya gerakan Khilafatul Muslimin. Hal ini penting untuk dipahami agar dapat memudahkan dalam melacak lebih jauh tentang konsep negara Islam yang dikembangkan oleh gerakan ini. Selain itu, dalam bab ini akan

dibahas tentang dinamika Khilafatul Muslimin untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan yang dialami oleh gerakan ini. Kemudian, dalam bab ini juga akan menguraikan bagaimana pandangan Khilafatul Muslimin mengenai sistem pemerintahan dalam Islam. Didalamnya akan diuraikan pandangan Khilafatul Muslimin secara umum tentang konsep Negara Islam dan Khilafah menurut Khilafatul Muslimin, ajaran-ajaran Khilafatul Muslimin, dasar-dasar pemerintahan Islam dan ideologinya. Kemudian pada pembahasan berikutnya, masih dalam bab ini, akan diuraikan tentang Kewajiban Penerapan Syari'at Islam di Indonesia.

Bab *keempat*, bab ini akan menguraikan hasil analisis secara kritis terhadap Konsep Pemerintahan dalam ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin. Serta, menganalisis terkait dengan relevansi ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin dengan situasi politik atau pemerintahan di Indonesia.

Bab *kelima*, adalah bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ISLAM DAN NEGARA

A. Konsep Negara dalam Islam

Ayat –ayat al-Qur'an tentang aspek kemasyarakatan dan kenegaraan sangat terbatas dan hanya dalam garis besar, yakni hanya berbentuk seperangkat nilai-nilai dan hukum-hukum dasar yang merupakan komponen penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini membawa konsekuensi munculnya ijtihad para ulama dan filsuf muslim tentang fikih atau filsafat kenegaraan untuk menggambarkan sebuah negara yang ideal menurut Islam. Meski bersumber pada ajaran Islam, dalam kenyataannya hasil ijtihad ini sebagian berbeda antara satu ulama/filsuf dengan lainnya, terutama antara hasil pemikiran pada masa klasik dengan masa kontemporer.

Pengertian negara ideal yang saya maksudkan adalah sama dengan yang diungkapkan mayoritas ulama, yakni negara yang sesuai dengan cita-cita ajaran Islam. Secara empiris, negara ideal ini mengacu kepada Negara Madinah, baik pada masa Nabi maupun pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*, karena di Negara Madinah ini ajaran-ajaran Islam dilaksanakan dengan sempurna, terutama dengan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Hanya saja, karena kondisi pada masa itu, maka format dan sistem kenegaraan yang ideal pada masa kini juga mengacu kepada penghargaan nilai-nilai kemanusiaan universal serta kecenderungan dunia modern yang rasional.

1. Pengertian Negara Menurut Islam

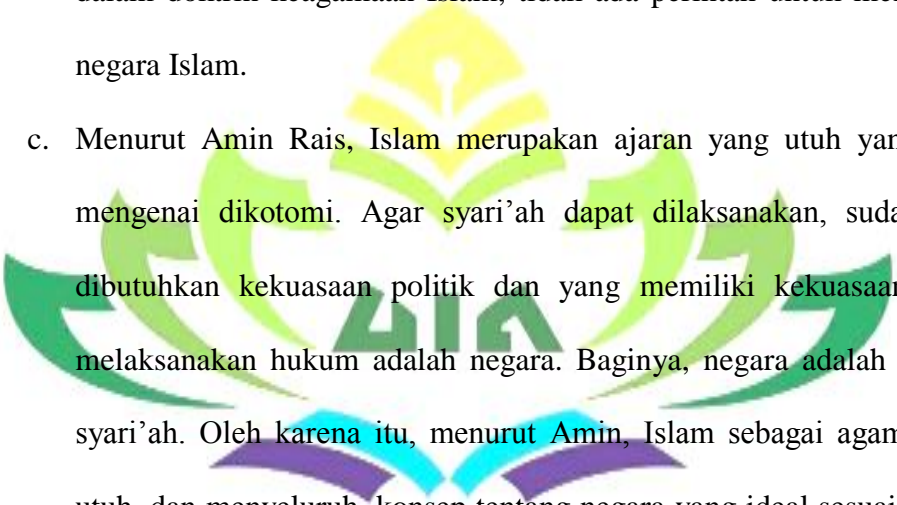
- a. Menurut Iqbal, negara Islam bersifat teokratis. Namun teokrasi di sini harus dibedakan dengan teokrasi di Barat. Menurut Iqbal, teokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan tauhid dan menerapkan nilai-nilai (prinsip-prinsip) persamaan, kesetiakawanan dan kebebasan yang terkandung di dalam tauhid. Negara adalah suatu alat untuk mentransfer prinsip-prinsip tersebut ke dalam ruang dan waktu.³²
- b. Menurut Abdurahman Wahid, ada dua pandangan dalam memahami negara; pemikiran idealistik dan pemikiran realistik, sebagaimana Abdurahman Wahid menguraikan:

“Dalam kerangka pemikiran idealistik, secara sadar dirumuskan sebuah kerangka negara-negara yang sepenuhnya berdasarkan wawasan Islam. Dalam pandangan ini, Islam merupakan sebuah konsep kenegaraan yang harus diwujudkan secara penuh, *in toto*, dalam sebuah bangunan masyarakat yang ‘seratus persen Islam’. Jenis pemikiran realistik tidak begitu tergoda oleh bangunan utopis dari sebuah negara menurut wawasan Islam, melainkan lebih tertarik pada pemecahan masalah bagaimana perkembangan historis dapat ditampung dalam pandangan Islam tentang negara. Tidak adanya bentuk baku sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk tetap yang ditinggalkan Rasulullah, baik melalui ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis, membuat perubahan historis atas bangunan negara yang ada menjadi tidak terelakkan atau tercegah lagi. Dengan kata lain, kesepakatan akan

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.198

bentuk negara tidak dilandaskan pada dalil naqli, melainkan pula kebutuhan masyarakat pada sewaktu-waktu.”³³

Menurut Gus Dur, “Islam tidak mengenal konsep negara. Alasannya Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif, misalnya soal suksesi.” Ia mempertanyakan, “Kalau memang Islam mempunyai konsep, tentu tidak demikian.” Gus Dur meyakini bahwa dalam doktrin keagamaan Islam, tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam.

- 
- c. Menurut Amin Rais, Islam merupakan ajaran yang utuh yang tidak mengenai dikotomi. Agar syari'ah dapat dilaksanakan, sudah pasti dibutuhkan kekuasaan politik dan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hukum adalah negara. Baginya, negara adalah penjaga syari'ah. Oleh karena itu, menurut Amin, Islam sebagai agama total, utuh, dan menyeluruh, konsep tentang negara yang ideal sesuai dengan tuntutan syari'ah.
- d. Menurut Jalaluddin Rakhmat bahwa jika negara itu diartikan *daulah* memang tak ada dalam Islam. Meskipun konsep negara itu sendiri, memang bisa berarti banyak. Ia bisa berarti *state*, *nation-state* dan *executive power*. Oleh karena itu, landasan ideal pemerintahan Islam, bersandar kepada tiga: *tauhid*, *istikhlaf*, dan *amanah*.
- e. Menurut Nurcholish Madjid berpendapat bahwa istilah “negara Islam” tidak dikenal dalam sejarah dan masalah kenegaraan tidak menjadi bagian integral dari Islam. Munculnya gagasan “negara Islam” atau

³²Dedi Supriyadi, *Op.cit*, h.179

“Islam sebagai negara” merupakan bentuk kecenderungan apologetis. Konsep “negara Islam” adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama, dan itu berarti merendahkan agama karena menempatkannya setaraf dengan berbagai ideologi yang ada di dunia.

- f. Menurut Natsir, negara adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu *“Kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan peri kehidupan manusia sendiri, sebagai individu, ataupun sebagai anggota dari masyarakat, baik yang berkenaan dengan kehidupan dunia yang fana ini ataupun yang berhubungan dengan kehidupan kelak di alam baka.”*³⁴

2. Peran Agama dan Negara

Ada beberapa tipologi model konstitusional yang dapat dipertimbangkan sebagai suatu pilihan, yaitu sebagai berikut:

- a. Teokrasi, yaitu suatu negara yang kebijakan publik sepenuhnya ditentukan oleh dominasi agama tertentu.
- b. Negara sebagian agama dan sebagian sekuler. Model ini menyediakan *power sharing* antara negara dan dominasi agama tertentu, tetapi kebijakan publik tetap didominasi tafsir-tafsir keagamaan dan pandangan moral agama tertentu.
- c. Negara sekuler dengan interaksi antara negara dan organisasi-organisasi keagamaan yang mendorong agama untuk memainkan peran penting dalam memengaruhi kebijakan publik.

³³*Ibid*, h.180-181

- d. Negara sekuler, yaitu organisasi-organisasi keagamaan ditoleransi sepanjang berada dalam ruang pribadi, tetapi tidak ada aktivitas bersama negara. Dengan kata lain, pandangan keagamaan tidak mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan publik.
- e. Negara sekuler dan ateistik yang agama ditindas dan diberangus.

Tampaknya, opsi ketiga lebih mendekati cetak-biru *the founding fathers* negeri kita untuk apa yang disebut “bina bangsa” dan “bina negara”. Di Indonesia, seluruh organisasi keagamaan bukan hanya memiliki pengakuan konstitusional ruang otonominya, melainkan juga dapat berkolaborasi dengan negara dalam tugas-tugas yang menjadi perhatian bersama. Tentu saja opsi ketiga itu bukan tanpa resiko. Bahaya yang paling krusial yang bisa muncul adalah legitimasi keagamaan. Biasanya, legitimasi ini muncul manakala agama diberi ruang sedemikian luas hingga mengurus hal-hal³⁵ di luar dirinya. Yang paling dekat dari dirinya adalah kekuasaan. Di sini, agama bisa tampil untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekuasaan dengan teks-teks keagamaan.

Hal itu sangat berbahaya karena tidak hanya memerkosa teks keagamaan untuk kepentingan politik sesaat, tetapi juga mengingkari semangat profetik agama-agama. Orang atau kelompok bisa melakukan apa saja atas nama agama, dan karena agama, orang atau kelompok, bahkan negara, saling menghancurkan.

³⁴ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h. 256

Oleh karena itu, opsi ketiga memerlukan adanya gerakan lintas agama (*inter-religious movement*) yang mengemban misi keadilan dan persamaan antar sesama manusia, makhluk Sang Maha Pencipta. Para pemimpin agama berkewajiban menjaga peran historis mereka sebagai kesadaran moral masyarakat dan mengangkat suara protes terhadap pelanggaran martabat manusia.³⁶

3. Islam Sebagai Dasar dan Ideologi Negara

Syari'at Islam juga pernah menjadi pijakan bagi masyarakat Islam di beberapa negara di dunia muslim, khususnya di Turki. Seperti kita ketahui, sekalipun Turki memutuskan menempuh jalan sekularisasi, namun mayoritas muslim Turki tetap berpijak pada syariat Islam sebagai sumber hukum Islam mereka, setidaknya dalam hukum kekeluargaan. Mereka melakukan pembaharuan syariat secara evolusi ketimbang revolusi. Lagi pula, dalam proses penyesuaian syariat dengan perkembangan modern, mereka sering melakukannya secara tantatif. Pada gilirannya, perkembangan ini sering mengakibatkan munculnya dualisme dan dikotomi hukum; hukum kekeluargaan menurut syariat pada satu pihak, dan hukum pidana yang semula dipinjam dari Eropa pada pihak lain..

Sejak masa awal perkembangan Islam sempat setidaknya zaman pramodern, masyarakat muslim mengenal hanya dua konsep teritorial politik-religius: *dar al-Islam* (wilayah damai), yaitu wilayah kaum muslim, dan *dar al-harb* (wilayah perang), yaitu wilayah non-muslim. Konsep *nation state* dengan

³⁵*Ibid*, h. 257

demikian menciptakan ketegangan historis dan konseptual. Untuk menyelesaikan ketegangan ini, para pemikir Arab berusaha mengembangkan konsep pluralisme bangsa dan teritorial. Landasan yang sering dikutip adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan membagi-baginya ke dalam bangsa dan suku untuk saling mengenal (QS. Al-Hujurat/49:1-3), dan bahwa terdapatnya bermacam bahasa dan warna kulit³⁷ merupakan "*tanda-tanda bagi orang yang mengetahui*" (QS. Al-Rum/30: 22). Pluralisme dengan demikian diabsahkan, sebab "*jika Allah mau, maka Ia dapat menciptakan kamu sekalian sebagai satu umat*" (QS. Al-Syura/42: 8).

Pluralisme bangsa dan teritorial jelas diterima Islam, tetapi pluralisme politik dalam kerangka modern, terutama dalam hubungannya dengan konsep *nation states*, perlu dikaji lebih jauh. Jika konsep *ummah wahidah* masih relevan, maka penerimaan pluralisme politik meniscayakan setidaknya toleransi, dan konsensus pemikiran (*ijma al-fikr*), konsensus perkataan (*ijma al-qawl*), dan konsensus tindakan (*ijma' al-fi'il*). Tanpa adanya *al-fi'il*, harmonisasi antara pluralisme politik dengan toleransi dan konsensus-konsensus tadi, maka yang akan tercipta adalah konflik dan pertarungan yang tidak kunjung selesai, tidak hanya di antara *nation states*, tetapi juga di dalam negara muslim tertentu. Pengalaman historis dan realitas kontemporer di Timur Tengah memperlihatkan bahwa negara-negara Arab pada umumnya gagal dalam hal ini, sehingga menyebabkan terjadinya konflik dan perang yang tak henti-hentinya.

³⁶Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Islam, Negara & Civil Society* (Jakarta : Paramadina, 2005), h. 44

Meski konsep *nation states* pada batas tertentu bukan tidak pernah dikenal sementara bangsa muslim, ia tidak pernah menjadi dasar pokok identitas politiknya. Istilah “Islami” yang paling dekat dengan *nation states* adalah *millah* (Arab), *millet* (Turki) atau *ummah* yang sederhananya berarti “masyarakat”. Tetapi, kedua istilah ini mengacu kepada kelompok sosio-religius, bukan kepada masyarakat politik, bahkan konflik dan perang, tetapi setiap bagian kelompok *ummah* tetap berada dalam barisan komunitas orang-orang beriman. Persaudaraan³⁸ keimanan ini kemudian diperkuat oleh kesetiaan bersama (*common allegiance*) kepada Dinasti Muslim yang berkuasa.

Pada pihak lain, konsep *nation states* berdasar pada kriteria-kriteria etnisitas, kultur dan bahasa, dan wilayah. Konsekuensinya, *polity* yang tercakup dalam *nation states* bersatu dengan mengabaikan garis-garis religius. Teori ini jelas tidak selaras dengan teori dan kultur politik Islam pramodern. Pada tingkat institusional, *nation states* berbenturan dengan “kekhalifahan”, atau institusi politik yang menegaskan bahwa semua wilayah *dar al-Islam* pada dasarnya merupakan suatu *religiously based super-state*, negara yang terbentuk bukan atas dasar etnisitas, kultur, dan bahasa atau kedudukan geografis, melainkan keimanan.

Terlepas dari ketegangan historis, konseptual, dan institusional antara *nation states* dengan kekhalifahan, Dinasti Turki Utsmani yang menguasai hampir seluruh Timur Tengah, segera terpaksa mengakui keunggulan politik Eropa seperti tercermin dalam sistem administrasi, militer, pemerintahan

³⁷*Ibid*, h. 45

provinsi, perdagangan dan keuangan, dan diplomatik. Reformasi ini kemudian menggelincir menjadi *westernisasi* yang langkahnya semakin jauh, sehingga sangat sulit dimundurkan lagi.

Tanzimat seolah tak terelakkan merangsang pertumbuhan nasionalisme Turki, dan kebangkitan nasionalisme Turki mendorong munculnya nasionalisme Arab. Tulisan ini tidak akan mendiskusikan perdebatan perkembangan nasionalisme Arab secara rinci. Yang penting adalah bahwa pada akhirnya, Islam tidaklah menjadi dasar nasionalisme Arab. Dalam praktiknya, apa yang disebut nasionalisme Arab memang tidak pernah terwujud secara kongret dan stabil. Nasionalisme Arab sesungguhnya adalah ideologi semu, ideologi³⁹ Arabisme sekuler sejak awal perkembangannya tidak efektif dalam menyatukan dunia Arab. Nasionalisme Arab tidak lebih dari sekadar slogan belaka. Nasionalisme Arab tidak mampu menghampus kenyataan, bahwa kawasan ini beragam dalam banyak hal. Setiap wilayah mempunyai sejarahnya sendiri; Arabisme sejak masa pertumbuhan awalnya justru dilacak pada warisan kultural masa pra-Islam. Yang lebih menonjol justru adalah regionalisme.

Jelaslah, bahwa salah satu konsekuensi logis dan penting dari gagasan *nation states* dan nasionalisme adalah liberalisme politik dari kontrol atau pengaruh Islam, atau lebih sempit lagi, yaitu syariat. Sistem *nation states* modern yang menekankan kesetiaan kebangsaan ketimbang persaudaraan Islam (*ukhuwwah Islamiyah*), egalitarianisme kedaulatan rakyat (*vox populi*)

³⁸*Ibid*, h. 46

ketimbang kedaulatan Tuhan (*vox dei*), hak-hak wanita dan representasi politik, tidak sesuai dengan doktrin syariat. Karena itu, para pemikir modernis, pada batas-batas tertentu dan *westernis* berupaya melakukan liberalisme syariat, agar sesuai dengan semangat dunia modern.⁴⁰

Contoh paling ekstrem liberalisme politik dari kontrol atau pengaruh syariat adalah Turki. Pada masa awal westernisasi Dinasti Utsmani sangat berhati-hati untuk tidak menyentuh syari'at, yang dianggap paling rawan untuk diperbarui. Para pembaru (*westernizers*) setidak-tidaknya sampai menjelang 1840-an tidak berani mempersoalkan supremasi syariat. Tetapi, pada 1839, suatu Dewan Ketetapan-ketetapan Hukum dibentuk, yang pada praktiknya memainkan fungsi-fungsi quasi legislatif dan hukum. Pada 1847, pengadilan perdata dan pidana dibentuk dengan prosedur-prosedur hukum dan pembuktian yang lebih berdasarkan praktik hukum Eropa ketimbang Islam.

Pada 1850, perubahan lebih radikal dilakukan, yaitu dengan penerapan Hukum Dagang, baik bentuk maupun substansi berdasarkan model-model Eropa. Selain itu, peradilan sekuler dibentuk untuk menangani kasus-kasus perdata dan pidana, yang menghasilkan *mecella* (1877). Dengan demikian, sejak menjelang akhir abad ke-19, yurisdiksi syariat dibatasi pada hukum kekeluargaan. Dengan kebangkitan Kemal Atturk (1926), kekuasaan hukum syariat dihapuskan sepenuhnya dan menggantinya dengan hukum Swiss.

Rekonstruksi Syariat Islam, kasus pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan Ambon dimasa kontemporer, khususnya kasus hukum rajam yang

³⁹*Ibid*, h. 47

diberlakukan Laskar Jihad, mencerminkan komplikasi-komplikasi diantara berbagai kerangka hukum yang sangat rumit di dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Karena itu, seperti dianjurkan Abdullah Ahmed al-Naim dalam karyanya *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* (1990), perlu pengkajian dan perumusan ulang mengenai *hudud*, khususnya dalam konteks “*cross-cultural; cross-religious, penological and sociological setting*”. Hal ini penting, tulis al-Naim, karena terdapat banyak perdebatan diantara ulama yang menimbulkan ketidakpastian, sehingga memunculkan potensi penetapan dan penerapan *hudud* secara tidak pas.⁴¹

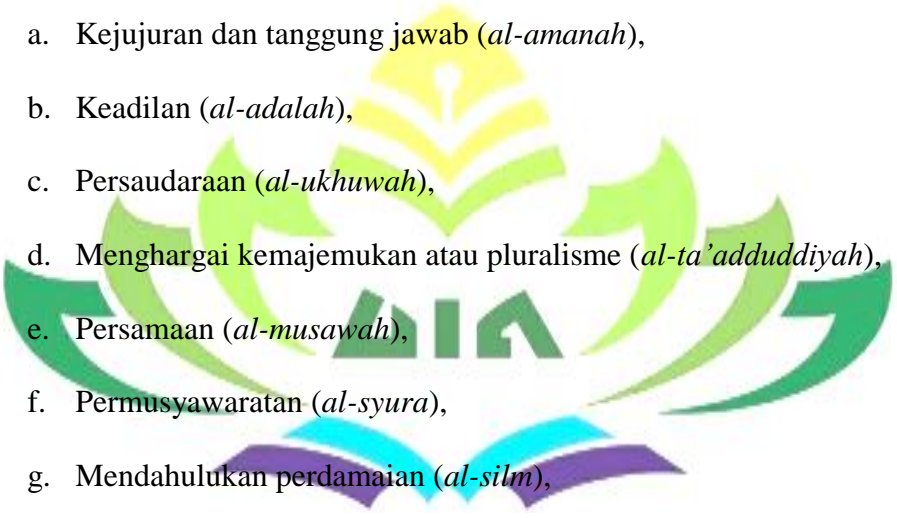
Selain itu, penerapan syariat Islam menghadapi masalah yang sangat kompleks di dalam masyarakat. Kompleksitas itu, antara lain, terletak pada realitas sosiologis masyarakat muslim yang bersangkutan, dalam hal ini masyarakat Aceh, misalnya. Harus diakui, masyarakat Aceh sekarang jauh berbeda dengan masyarakat Aceh pada kesultanan dulu. Diversifikasi dan diferensiasi masyarakat Aceh, terutama sebagai hasil dari perubahan sosial sejak 1970-an, membuat pandangan dunia berbagai lapisan sosiologis masyarakat Aceh tentang Islam juga berbeda-beda. Lebih tegas lagi, terdapat perbedaan pemahaman tentang syariat, khususnya dalam posisinya sebagai hukum positif dalam sistem hukum Daerah Istimewa Aceh nantinya.⁴²

⁴⁰*Ibid*, h. 48

⁴¹*Ibid*, h. 49

4. Prinsip-prinsip Bernegara dalam Islam

Di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang juga didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansinya tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain itu.

- 
- a. Kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*),
 - b. Keadilan (*al-adalah*),
 - c. Persaudaraan (*al-ukhuwah*),
 - d. Menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-ta'adduddiyah*),
 - e. Persamaan (*al-musawah*),
 - f. Permusyawaratan (*al-syura*),
 - g. Mendahulukan perdamaian (*al-silm*),
 - h. Kontrol (*amr bi al-ma'ruf 'an al-munkar*).⁴³

Disamping pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, umat Islam juga diwajibkan melaksanakan hukum-hukum Allah, sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Nisa': 57 di atas, serta Q.S. al-Maidah : 44, 47 dan 48: "*Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir*"; "*....orang-orang zalim*","*...orang-orang fasiq*". Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian, kafir, zalim dan fasiq tersebut, namun pendapat 'Atha' dan Ibn 'Abbas kiranya lebih tepat untuk dijadikan pedoman, yakni *kufir dun kufir*, *zhulm dun zhulm* dan *fisq dun fisq*,

⁴²*Ibid*, h. 75

kecuali jika tidak mengamalkan hukum-hukum itu karena keingkaran dan kesombongan terhadapnya. Oleh karenanya, jika pada saat ini hukum-hukum itu belum/tidak bisa dilaksanakan di sebuah masyarakat Islam, hal ini bukan berarti kita menolaknya secara ingkar, tetapi seharusnya di dasarkan atas alasan, bahwa kondisi sosial politik seperti sekarang belum/tidak memungkinkan.

Dalam al-Qur'an maupun hadits tidak disebutkan secara eksplisit apakah negara itu berbentuk republik atau kerajaan, sistem presidensil atau parlementer. Tidak dijelaskan pula, bagaimana sistem pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Demikian juga, bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada, apakah terdapat distribusi keharusan memisahkan (*separation of power*), pembagian (*distribution of power*) atau penyatuan kekuasaan (*intergration of power*) antara kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.⁴⁴

5. Tugas dan Tujuan Pemerintahan dalam Islam

Pembentukan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan para juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan maupun keagamaan dan untuk memelihara agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Bagi mereka kekuasaan politik merupakan alat untuk melaksanakan syari'at Islam, menegakkan keadilan, mewujudkan

⁴³*Ibid*

kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan umat lewat kerjasama dan tolong-menolong, dan menciptakan keamanan dan ketenangan.

Al-Baqqillani bahwa tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, pemeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji dengan baik, dan menjalankan syari'at yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai de⁴⁵ngan syari'at.

Bagi Al-Mawardi lembaga imamah mempunyai tugas dan tujuan umum. *Pertama*, mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijmak oleh *salaf* (generasi pertama umat Islam). *Kedua*, melaksanakan kepastian hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa atau berpekar dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya. *Ketiga*, melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta. *Keempat*, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. *Kelima*, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. *Keenam*, jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam. *Ketujuh*, memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan *syara'*, *nash*, dan *ijtihad*. *Kedelapan*, mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif. *Kesembilan*, meminta nasehat dan pandangan

⁴⁴J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyashah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2002), h. 259

dari orang-orang terpercaya. *Kesepuluh*, dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.⁴⁶

Tugas dan tujuan lembaga Pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.⁴⁷

6. Bentuk Negara dalam Sistem Pemerintahan Islam

Mengklasifikasi bentuk-bentuk pemerintahan dapat dilihat pada beberapa orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Aristoteles dalam bukunya *Politika* menyebutkan beberapa kemungkinan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara: a) kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan satu orang, atau b) kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan beberapa orang, dan atau c) kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan banyak orang. Lebih lanjut ia jelaskan, jika kategori pertama dan tujuan pemerintahannya adalah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum maka bentuk pemerintahan yang demikian disebut *monarki*. Apabila kategori kedua dan tujuan pemerintahan adalah kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum, maka bentuk negara yang demikian disebut *aristokrasi*. Dan jika kategori ketiga dan tujuan pemerintahannya untuk kepentingan,

⁴⁵*Ibid*, h. 260

⁴⁶*Ibid*, h. 261

kebaikan dan kesejahteraan umum maka pemerintahan yang demikian itu disebut *politeia* (kata Yunani) yang berarti *konstitusi*.⁴⁸

Dalam kaitan itu, di antara pemikir sunni yang dikedepankan dalam tulisan ini, hanya Rabi' yang bicara soal bentuk pemerintahan. Dari berbagai bentuk pemerintahan yang ada, bagi Rabi', bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah bentuk *monarki*. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang saja, yaitu raja. Ia menolak pemerintahan aristokrasi. Suatu pemerintahan yang berada di bawah pimpinan sekelompok orang terpilih; bangsawan atau ningrat. Ia juga tidak menerima bentuk pemerintahan *oligarki*. Model pemerintahan ini kekuasaan tertinggi berada di tangan kelompok kecil orang-orang yang berpengaruh atas masyarakat. Dan ia juga tidak dapat membenarkan pemerintahan *demokrasi* yang diperintah oleh rakyat.⁴⁹

Al-Ghazali pun, tampaknya, lebih condong kepada pemerintahan monarki,. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa seseorang yang akan menjadi kepala negara harus mendapat *tafwidh* dari pemegang kekuasaan, dan inilah yang berlaku saat itu. Pemikir-pemikir lain pun bisa dimasukkan ke dalam alur pemikiran Rabi' dan Al-Ghazali. Penggolongan ini didasarkan pada penolakan, mereka terhadap doktrin politik Syi'ah, dan doktrin politik Khawarij yang bebas dan terbuka. Sebab untuk menyebut⁵⁰ mereka cenderung kepada bentuk atau macam pemerintahan lain, aristokrasi dan demokrasi misalnya, kita tidak melihat indikasi pemikiran mereka yang mengarah ke sana.

⁴⁷*Ibid*,h. 267

⁴⁸*Ibid*,h. 268

⁴⁹*Ibid*

Ibn Khaldun membagi corak pemerintahan kepada tiga macam. Pertama, *al-mulk al-thabi'iy*, suatu pemerintahan yang mengikuti hawa nafsu, sewenang-wenang dan monopoli. Kedua, *al-mulk al-siyasiy*, pemerintahan yang mengendalikan kepada rekayasa akal fikiran dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan menghapuskan kemelaratan. Ketiga, *khilafah* atau *imamah*, pemerintah yang mengikuti ajaran agama dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.⁵¹

Adapun sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah (khilafah berdasarkan syura dan khilafah monarki), imamah, monarki dan demokrasi.⁵²

a. Sistem pemerintahan khilafah

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi bermacam-macam suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw.⁵³

Jabatan ini merupakan peganti Nabi Muhammad Saw, dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan

⁵⁰*Ibid*,h. 270

⁵¹Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Op.Cit*, h. 204

⁵²*Ibid*,h. 205

kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut khilafah (kekhalifahan). Orang yang menjalankan tugas itu disebut khalifah.⁵⁴

Jumhur ulama memberikan larangan terhadap nama demikian, karena menurut mereka ayat tersebut tidak bermaksud begitu. Lagi pula, Abu Bakar menolak ketika beliau dipanggil dengan nama tersebut. “Saya bukan khalifah Allah, tapi khalifah Rasulillah”.⁵⁵

1) Khilafah berdasarkan Syura

Sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah berdasarkan syura dipraktekkan pada masa al-Khulafa al-Rasyidun ketika mereka memimpin umat Islam di beberapa kawasan yang didasarkan pada sistem musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasaannya. Abu Bakar al-Siddiq, Umar⁵⁶ bin al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib telah menjalankan sistem pemerintahan yang dilandasi oleh semangat musyawarah.⁵⁷

Ciri yang menonjol dari sistem pemerintahan yang mereka jalankan terletak pada mekanisme musyawarah, bukan dengan sistem keturunan. Tidak ada satupun dari empat khalifah tersebut yang menurunkan kekuasaannya kepada sanak kerabatnya. Musyawarah menjadi cara yang ditempuh dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah.⁵⁸

⁵³*Ibid*,h. 206

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵*Ibid*

⁵⁶*Ibid*,h. 207

⁵⁷*Ibid*,h. 208

2) Khilafah berdasarkan Monarki

Pasca berakhirnya masa al-Khulafa al-Rasyidun, kekhilafahan dilanjutkan oleh Dinasti Bani Umayyah dengan Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai khalifah pertama. Sejak saat itulah khilafah Islamiyah yang sudah berdasarkan syura digantikan dengan sistem keturunan, menjadi negara kerajaan (monarki) mengikuti sistem yang diberlakukan di Persia dan Romawi.

Sistem khilafah monarki ini disebut oleh Antony Black dengan khilafah patrimonial. Patrimonialisme yang dimaksudkan di sini adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada seorang pemimpin untuk menganggap negara sebagai miliknya dan bisa diwariskan kepada keluarganya (turun-menurun) sementara rakyat dipandang⁵⁹ sebagai bawahan yang berada di bawah perlindungan dan dukungannya. Menurut konsep ini, kekuasaan pemimpin bersifat mutlak dan tidak bisa dicampuri orang lain (apalagi hukum konstitusional), tetapi ia tunduk kepada aturan tak tertulis yang memosisikannya sebagai kepala keluarga (bapak) yang dermawan.⁶⁰

b. Imamah

Pada awalnya, imamah adalah suatu istilah yang netral untuk menyebut sebuah negara. Dalam literatur-literatur klasik, istilah imamah dan khilafah disandingkan secara bersamaan untuk menunjuk

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹*Ibid*

pada pengertian yang sama, yakni negara dalam sejarah Islam. Tetapi dalam perkembangannya imamah kemudian menjadi istilah khusus yang dipergunakan di kalangan Syi'ah yang dikontekstualisasikan dalam bentuk *wilayah al-faqih*.⁶¹

c. Demokrasi

Selain sistem pemerintahan khilafah dan imamah, ada sistem pemerintahan lain yang dipraktikkan oleh umat Islam dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*). Yaitu sistem pemerintahan demokrasi yang sekarang ini banyak dipraktekkan sejumlah negara-negara muslim.⁶²

Kata demokrasi memiliki berbagai makna. Tetapi dalam dunia yang telah modern ini kegunaannya mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik merupakan hak rakyat.

Di zaman sekarang, beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Namun demokrasi, pengaruh Islam dalam pemerintahan masih begitu nampak dengan banyaknya perundang-undangan yang berbasis pada syariat. Demokrasi tidak dijalankan secara sekuler seperti di negara-negara Barat, melainkan demokrasi yang mendapat pengaruh Islam.⁶³

⁶⁰*Ibid*,h. 211

⁶¹*Ibid*,h. 215

⁶²*Ibid*

d. Monarki

Monarki adalah sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, di mana yang berhak menggantikan sang raja adalah keturunannya. Rakyat tidak memiliki hak untuk menggantikan kekuasaan. Titah raja harus diikuti oleh rakyatnya. Sehingga ada ketundukan penuh dari rakyat yang diperintah.⁶⁴

Kalau di zaman klasik, pemerintahan monarki dalam sejarah Islam berbentuk khilafah yang dicirikan dari wilayah kekuasaannya yang luas karena diikat oleh Islam, maka, monarki di zaman sekarang ini menggunakan bentuk *nation-state* (negara bangsa). Yakni monarki dalam bentuk kebangsaan yang mana kekuasaannya tidak lagi seluas di zaman klasik. Biasanya dalam satu suku bangsa. Tetapi ada bentuk lain dari monarki, yaitu monarki konstitusional yang secara jelas dalam konstitusinya disebutkan sebagai negara kerajaan.⁶⁵

B. Munculnya Pemikiran Tentang Islam Sebagai Dasar Negara di Indonesia

Hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya memiliki kedudukan yang amat penting. Namun sebagian besar, menurut Abdurrahman Wahid. Kini sebagian besar merupakan proyeksi teoritis dan pengkajiannya lebih bersifat ‘pertahanan’ daripada kemusnahan. Bekas-bekasnya dan pengaruhnya yang masih tampak. Lambat laun terjadi proses yang menuntut adanya penilaian ulang agar hukum Islam tidak kehilangan elan vitalnya dan relevansinya dengan kehidupan

⁶³*Ibid*, h. 219

⁶⁴*Ibid*

masyarakat yang terus-menerus berkembang. Munculnya imam-imam mazhab, masih menurut Abdurrahman Wahid, tidaklah dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam. Bahkan karena tingkat toleransi diantara mazhab itu sebagian besar, hampir tidak ditemukan kodifikasi hukum Islam yang seragam untuk semua negara, atau untuk wilayah-wilayah yang berbeda-beda dari sebuah negara Islam. Sampai saat ini baru al-Majalah al-Ahkam al-'Adaliyyah yang dianggap sebagai kodifikasi hukum Islam yang dinilai kalangan umat Islam sebagai kodifikasi universal. Karena itulah usaha kodifikasi dan unifikasi, paling tidak dalam kasus Indonesia, menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan. Boleh jadi, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan inti pokok materi bahasan ini, mewakili elemen-elemen hukum Islam di Indonesia dengan keterbatasan ruang lingkupnya.

Di Indonesia, hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meski didominasi oleh fiqh Syafi'iyah. Hal ini, kata Rachmat Djatnika, fiqh Syafi'iyah lebih banyak dan dekat kepada kepribadian Indonesia. Namun lambat laun, pengaruh mazhab Hanafy, mulai diterima. Penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam ini, dapat dilihat pada masa-masa kerajaan Islam awal. Pada zaman kesultanan Islam, menurut Djatnika, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai⁶⁶ hukum negara. Di Aceh atau pada pemerintahan Sultan Agung hukum Islam telah diberlakukan walau masih tampak sederhana.⁶⁷

⁶⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), h.

⁶⁶*Ibid*, h. 13

Teori eksistensi hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah datang ke Indonesia (Hindia Belanda), mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Nasrani, di samping hukum adat bangsa Indonesia (*adatrecht*). Berlakunya hukum Islam bagi sebagian penduduk Hindia Belanda, berkaitan dengan munculnya kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 M. Menurut C. Snouck Hurgronje sendiri, bahwa pada abad ke-16 di Hindia Belanda sudah muncul kerajaan Islam, seperti Mataram, Banten, dan Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan seluruh penduduknya.

Walaupun pada mulanya kedatangan Belanda (yang beragama Kristen Protestan) ke Hindia Belanda tidak ada kaitannya dengan masalah hukum agama, namun pada perkembangan selanjutnya, berkaitan dengan kepentingan penjajah, akhirnya mereka tidak bisa menghindari terjadinya persentuhan dengan masalah hukum adat bagi penduduk pribumi (*inlander*). Sehubungan dengan hukum yang berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, muncullah beberapa teori yang dikenal dengan teori *Receptioin Complexu*, teori *Receptie* (Resepsi), teori *Receptie Exit* dan teori *Receptio A Contrario*, dan teori *Eksistensi*.⁶⁸ Dua teori pertama muncul pada masa sebelum Indonesia merdeka dan tiga teori muncul setelah Indonesia merdeka.

⁶⁷Musthofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 143

1. Teori *Receptioin Complexu*

Menurut teori ini, bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain.

2. Teori *Receptie*

Menurut teori ini, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, melainkan hukum adat.⁶⁹

3. Teori *Receptie Exit*

Semangat pemimpin Islam menentang pemikiran Snouck Hurgronje, dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat, terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Upaya itu tampak umpamanya dengan lahirnya Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) pada tanggal 22 Juni 1945.

Piagam Jakarta merupakan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Ia disusun atas kesepakatan serta disahkan oleh 9 (sembilan) orang tokoh bangsa Indonesia, 8 (delapan) orang diantaranya beragama Islam. Menurut Soekarno, ia merupakan *gentlement agreement*, yaitu hasil kompromi antara dua pihak, di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.⁷⁰

⁶⁸*Ibid*, h. 144

⁶⁹*Ibid*, h. 145

Lahirnya Piagam Jakarta merupakan bagian dari keberhasilan usaha tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam bagi orang Islam. Sebelum Piagam Jakarta lahir, terjadi perdebatan pemikiran tentang Negara Islam (*Islam State*) dan Negara Muslim (*Muslim State*). Untuk ungkapan *Muslim State*, Supomo menyebut dengan ungkapan *negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam*: Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, antara lain ia mengatakan sebagai berikut :

“Bagaimana dalam negara yang saya gambarkan akan berhubungan antara negara dan agama? Oleh anggota yang terhormat Moh.Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah paham-paham dari anggota-anggota ahli agama menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh tuan Moh.Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan kata lain perkataan: perkataan bukan negara Islam. Apa sebabnya di sini saya mengatakan ‘bukan negara Islam?’” Perkataan negara Islam” lain artinya daripada perkataan “Negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam”.

Menurut Supomo, dalam negara yang tersusun sebagai “negara Islam”, negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, bersatu padu.

Selanjutnya, mengenai negara Indonesia yang diusulkan oleh Supomo adalah sebagai berikut.

“Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat a religious. Itu bukan. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu⁷¹ hendaknya Negara Indonesia yang memakai dasar moral yang luhur yang dianjurkan juga oleh agama Islam”.

⁷⁰*Ibid*, h. 146

Menurut Muhammad Yamin, Piagam itu merupakan dokumen politik yang terbukti mempunyai daya penarik dapat mempersatukan gagasan ketatanegaraan dengan tekad bulat atas persatuan nasional menyongsong datangnya negara Indonesia yang merdeka berdaulat.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 (sehari setelah proklamasi kemerdekaan). Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bagian Pembukaan UUD tersebut adalah Piagam Jakarta setelah dikurangi 7 kata setelah kata ketuhanan pada alinea keempat. Tujuh kata yang dihilangkan itu ialah dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Penghapusan tujuh kata tersebut menurut Mohammad Hatta, untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, setelah adanya usul keberatan dari mereka yang tidak beragama Islam terhadap tujuh kata di atas. Dengan pencoretan tujuh kata pada Piagam Jakarta tersebut, menurut Mohamad Roem, golongan Islam yang sudah ikut mencapai kompromi dengan susah payah merasa kecewa.

Undang-undang yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 walaupun pembukaannya tidak utuh sebagaimana yang terdapat dalam naskah Piagam Jakarta, setelah dikurangi tujuh kata, di dalamnya terdapat landasan filosofis dan yuridis tentang pemberlakuan hukum agama bagi pemeluknya. Landasan filosofis adalah Pancasila sebagaimana rumusannya terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dan landasan yuridis terdapat dalam Pasal 29 UUD 1945.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara berdasar kepada: *Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* (Rumusan Pancasila).

Adapun Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 berbunyi ; *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁷²

Dalam dekrit 5 Juli 1959 itu selain ditetapkan Piagam Jakarta dalam konsiderans, dalam diktum ditetapkan pula “Penetapan UUD 1945 berlaku lagi”. Oleh karenanya Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Sedangkan maksud dari kata “Menjiwai” secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundang-undangan dalam negara Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Secara positif berarti bahwa pemeluk-pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional (Ismail Suny, 1987 : 77)⁷³

4. Teori *Receptio A Contrario*

⁷¹*Ibid*, h. 147

⁷²Khoiruddin Buzama, “Perberlakuan teori-teori hukum Islam di Indonesia”. (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300> (12 Januari 2019)

Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Sayuti Thalib ternyata dalam masyarakat telah berkembang yang lebih jauh dari pendapat Hazairin di atas. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya terlihat ada kecenderungan teori Resepsi dari Snouck Hurgronje itu dibalik..

5. Teori *Eksistensi*

Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah (1) Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya. (2) Ada, dalam arti adanya kemandirian yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; (3) Ada dalam hukum nasional dalam arti negara hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; (4) ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori Eksistensi diatas keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional.⁷⁴

Masyarakat berperadaban dijembatani oleh paradigma dan implementasi hukum Islam yang bisa menerjemahkan realitas sosial.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Abiya' ayat 107 berbunyi:

⁷³*Ibid*, h. 150

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Aku tidak mengutus engkau hai Muhammad dengan membawa agama Islam, kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam.”⁷⁵

Dengan demikian, ini berarti kehadiran Islam itu membawa misi universal yang berkorelasi secara signifikan dengan permanusiaan manusia dan lingkungan hidup.⁷⁶

C. Sistem-sistem Pemerintahan Era Modern dan Indonesia

1. Sistem Tata Negara di Indonesia

a. Sistem Pemerintahan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945

- 1) Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum
- 2) Sistem Konstitusional
- 3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat
- 4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
- 6) Menteri negara ialah pembantu presiden
- 7) Kekuasaan negara tidak tak terbatas

b. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945

- 1) Hubungan antara MPR dan Presiden
- 2) Hubungan antara MPR dan DPR
- 3) Hubungan antara DPR dan Presiden
- 4) Hubungan antara Presiden dengan Menteri-menteri
- 5) Hubungan antara BPK dan DPR.⁷⁷

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hal 331.

⁷⁵*Ibid*, h. 152

2. Keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan di Indonesia

a. Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia

1) Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia

Keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia sebaiknya mendorong keragaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghormati keberagaman adalah sikap terpuji sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam pula.⁷⁸

Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati.⁷⁹

Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar

⁷⁶“Pancasila 14” (On-line), tersedia di: sistem.pemerintahan.negara.ri.menurut.uud.1945-staff.uny.pdf [staff.uny.ac.id >sites>files>pendidikan](http://staff.uny.ac.id/sites/files/pendidikan) (13 Januari 2019).

⁷⁷*Ibid*, h. 85

⁷⁸*Ibid*

masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Letak strategis wilayah Indonesia
 - b) Kondisi negara kepulauan
 - c) Perbedaan kondisi alam
 - d) Keadaan transportasi dan komunikasi
 - e) Penerimaan masyarakat terhadap perubahan⁸⁰
- 2) Keberagaman suku

Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Koentjaraningrat suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal usul dan tempat asal serta kebudayaan.⁸¹

Keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Mereka harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan

⁷⁹*Ibid*, h. 86

⁸⁰*Ibid*, h. 87

budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan.⁸²

3) Keberagaman agama dan kepercayaan

Ajaran agama Hindu dan Budha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Indonesia dibawa oleh pedagang Gajurat dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Kong Hu Chu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme.⁸³

Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.⁸⁴

4) Keberagaman ras

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan-Mongoloid yang ada di Sumatra,

⁸¹*Ibid*, h. 89

⁸²*Ibid*, h. 91

⁸³*Ibid*

Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua adalah ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika.⁸⁵

5) Keberagaman antargolongan

Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut "*Social Stratification*" atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Hal ini diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban (file.upi.edu)⁸⁶

Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat ditandai adanya segmentasi dalam kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa

⁸⁴*Ibid*, h. 94

⁸⁵*Ibid*, h. 96

kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri dari atas dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur.⁸⁷

Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan suatu kewajaran. Namun, keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul apabila muncul perasaan etnosentrisme yang menganggap hanya kelompok atau golongannya saja yang paling baik dan sempurna, sementara golongan lainnya dianggap banyak memiliki kekurangan.⁸⁸

Keberagaman antargolongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antargolongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional.⁸⁹

Meskipun berbeda-beda golongan namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia.

⁸⁶*Ibid*

⁸⁷*Ibid*

⁸⁸*Ibid*

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa.⁹⁰

b. Arti Penting Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah motto semboyan bangsa Indonesia. Dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (2012 :196) dimana dalam buku tersebut mengutip pendapat Suhandi Sigit, menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis “Rwaneka dhatu winumus Buddha Wisma, Bhinneki rakwa ring apan kena perwanosen, Mangkang Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ikatan hana dharma mangrua” (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah yang berbeda. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua). Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu.⁹¹

Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras,

⁸⁹*Ibid*

⁹⁰*Ibid*, h. 99

dan agama namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, dimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena setiap orang hanya akan hanya mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara.⁹²

c. Perilaku Toleran terhadap keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan

Semua orang di Indonesia meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui enam agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk

⁹¹*Ibid*, h. 101

perilaku kehidupan dalam keberagaman agama di antaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar.
- 2) Menghormati agama yang diyakini orang lain.
- 3) Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain.
- 4) Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain.⁹³

Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia lain. Marilah mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.⁹⁴

Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus semangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia.⁹⁵

⁹²*Ibid*

⁹³*Ibid*, h. 104

⁹⁴*Ibid*, h. 105

D. Ciri dan Karakteristik Madrasah Moderat

1. Percaya kepada Hikmah Syariat yang mengandung Kemaslahatan.

Ciri dan karakteristik pertama adalah percaya kepada hikmah syariat yang mengandung kemaslahatan, segala hal yang dibutuhkan manusia, serta hal yang bisa memberikan manfaat dan kemajuan kepada manusia. Ini dikarenakan syariat diturunkan oleh⁹⁶ Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dengan demikian, syariat adalah cermin ilmu dan hikmah-Nya.

Adapun tentang ketidaktahuan Allah, hal itu sama sekali dijauhkan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman,

“Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak – pila – di langit.” (Ali Imran: 5)⁹⁷

“Dia menciptakan manusia, mengetahui kemaslahatan dan kerusakan bagi manusia, serta hal yang bisa membuat manusia maju dan mundur. Allah Ta'ala berfirman, “Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rasiakan. Dan Dia Mahahalus serta Maha Mengetahui.” (Al-Mulk: 14)⁹⁸

“Dia pun menyifati risalah Muhammad dengan, “Dan Kami tidak mengurus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” (Al-Anbiyaa’: 107)⁹⁹

Untuk itu, madrasah moderat percaya bahwa syariat islam mengandung rahmat, kemudahan, dan keringanan bagi manusia. Barangsiapa yang menyangka syariat tidak seperti itu, dia telah memfitnah syariat.

⁹⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 152

⁹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 50

⁹⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, h. 151

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 331

Sangkaan tersebut sama dengan buruk sangka atau paling sedikit, tuduhannya telah disalahkan oleh kebenaran.

Para ahli fikih yang melakukan ijtihad wajib mencurahkan kemampuan mereka untuk mengetahui hikmah dan maksud-maksud yang ada di balik syariat. Sehingga, mereka akan sampai kepada ucapan Ibnul Qayyim, “Seluruh syariat mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Segala masalah yang mengubah keadilan menjadi kezhaliman, rahmat menjadi bencana, syahadat menjadi kemudharatan, dan hikmah menjadi kebatilan, adalah bukan syariat. Meskipun masalah tersebut dicoba untuk ditakwil.¹⁰⁰

2. Menggabungkan Teks dan Hukum Syariat.

Madrasah moderat pun percaya bahwa jika orang ingin memahami syariat dengan benar, mengetahui hakekatnya sebagaimana yang diinginkan oleh yang menurunkannya, dicontohkan oleh Nabi, dan dipahami oleh para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dia tidak boleh melihat teks-teks dan hukumnya secara terpisah dan berserakan, tidak ada kaitan, serta hubungan antara satu dengan yang lain. Namun, dia harus mengaitkan antara satu dengan yang lain dan melihat hukum-hukum syariat dengan komprehensif. Dia tidak boleh terjebak dengan pembagian ahli fikih di zaman dahulu atau ahli hukum di zaman sekarang yang membagi bab serta hukum syariat kepada ibadah, nikah, muamalah, kriminal, sanksi, keputusan hukum, dakwah, *siyasah syar’iyyah*, jihad, dan hubungan internasional. Ahli

⁹⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, h. 154

fikih yang benar akan mendapatkan bahwa seluruh perkara yang ada di dalam bab tersebut saling berhubungan. Satu dengan yang lain saling mempengaruhi, membutuhkan, menafsirkan, dan membantu.

Orang yang mengetahui karakteristik ini pasti akan mampu mendapatkan solusi beragam masalah, yang terkadang dipandang rumit oleh orang lain.¹⁰¹

3. Memandang dengan Adil Terhadap Urusan Agama dan Dunia.

Salah satu karakteristik madrasah ini adalah melihat permasalahan dunia dan kehidupan dengan pandangan seimbang dan adil. Ia tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan, serta tidak melampaui atau mengurangi timbangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya : “Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Ar-Rahman: 8-9)¹⁰²

Inilah yang menyebabkan ia dinamakan madrasah moderat. Ia moderat ketika melihat agama, alam, manusia, kehidupan individu, dan publik.¹⁰³

¹⁰⁰*Ibid*, h. 155

¹⁰¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hal 531.

¹⁰²Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit*, h. 156

4. Menyambungkan Teks dengan Realita Kehidupan.

Salah satu karakteristik madrasah ini adalah tidak hidup di menara gading –hingga merasa lebih tinggi dari manusia--- dan biara terpencil --- hingga lupa terhadap masalah manusia-. Namun, ia hidup dengan dan bersama manusia. Ia mendengar rintihan, merasakan kesakitan, dan merasakan kelaparan manusia. Baik individu, keluarga, dan jamaah. Ia pun hidup dengan kebutuhan manusia yang dekat, jauh, dangkal, dan dalam. Ia berusaha memeriksa penyakit dan mendapatkan obat. Sehingga, setiap permasalahan ada solusi, setiap penyakit ada obat, dan setiap persoalan ada jalan keluar. Semuanya terdapat dari apotek syariat sendiri. Karena, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obat. Ia bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak¹⁰⁴ diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Hal tersebut berlaku bagi obat materi dan obat maknawi.

Syariat telah maju ke berbagai peradaban kuno. Ia tidak pernah ambigu terhadap sebuah masalah dan pesimis untuk mencari solusi. Namun, semenjak zaman sahabat, para ahli fikih telah mendapatkan dasar-dasar dan hukum syariat yang sesuai dengan kemaslahatan manusia serta bisa membuat mereka maju.

Untuk itu, ulama madrasah ini berusaha untuk mendapatkan solusi dari segala masalah. Agar manusia yakin bahwasannya syariat selalu cocok untuk setiap waktu dan tempat mana pun.

¹⁰³*Ibid*

5. Memudahkan Manusia.

Salah satu karakteristik madrasah ini adalah memudahkan dan meringankan manusia. Ini adalah cabang dari karakteristik¹⁰⁵ sebelumnya. Dalam hal ini, madrasah moderat melakukan ittiba', bukan bid'ah. Memudahkan adalah manhaj Al-Qur'an dan Nabi. Manhaj tersebut diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Beliau memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Baik individu ataupun jamaah. Ketika mengutus dngan wasiat ini, "*Mudahkan jangan menyulitkan, beri kabar gembira bukan ketakutan, dan taatlah bukan berselisih.*"¹⁰⁶

Hal yang beliau wasiatkan kepada Muadz dan Abu Musa beliau wasiatkan juga kepada umat. Anas meriwayatkan bahwa beliau pernah bersabda, "*Mudahkanlah dan jangan menyulitkan, berilah kabar gembira dan jangan ketakutan,*" dengan demikian, yang diminta adalah memudahkan dalam fatwa, dan memberi kabar gembira dalam dakwah.¹⁰⁷

Ini tidak berarti bahwa madrasah moderat membengkokkan teks untuk mencari yang paling mudah bagi manusia. Namun, madrasah moderat meneliti teks dan memperdalam pemahaman agar menemukan kemudahan agama yang diinginkan oleh Allah. Jika ada dua pendapat yang sama atau berdekatan, salah satunya mudah dan yang lainnya susah, madrasah moderat akan mengambil yang mudah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah.

¹⁰⁴*Ibid*, h. 157

¹⁰⁵*Ibid*, h. 158

¹⁰⁶*Ibid*

Beliau tidak disodorkan dua perkara kecuali selalu memilih yang paling mudah.¹⁰⁸

Ulama sering menguatkan pendapat mereka dengan perkataan, “Ini lebih mudah bagi manusia.”¹⁰⁹

Jika berijtihad, mereka pun sering membetulkan muamalah manusia sesuai dengan kemampuan. Mereka menyandarkan hal tersebut kepada kaidah-kaidah syariat, seperti; *adh-dharurat tubih al-mahzhurah* (keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang), *al-hajah tunazzil manzilah adh-dharurah* (kebutuhan mendesak disesuaikan dengan kedudukan darurat), *adh-dharar yuzal* (darurat harus dihilangkan), *al-adah muhakamah* (adat menjadi hukum), *al-masyaqquh tajib at-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), serta kaidah-kaidah lainnya yang dibuat oleh ulama dan mereka ambil dari teks-teks dan hukum-hukum syariat.¹¹⁰

6. Terbuka, Dialog, dan Toleran terhadap Dunia.

Madrasah ini pun percaya dengan keuniversalan Islam yang merupakan rahmat semesta alam dan dakwah bagi seluruh manusia. Untuk itu, permasalahan-permasalahan lokal tidak bisa memalingkannya dari dimensi universal. Ia percaya kepada kesatuan keluarga manusia. Dari segi penciptaan, seluruh umat manusia bersatu kepada satu Tuhan, dan dari segi nasab, seluruh umat manusia bersatu kepada satu bapak. Untuk itu, ia melakukan dialog antaragama dan antarperadaban, kita kesampingkan dulu antarmadzhab.¹¹¹

¹⁰⁷*Ibid*

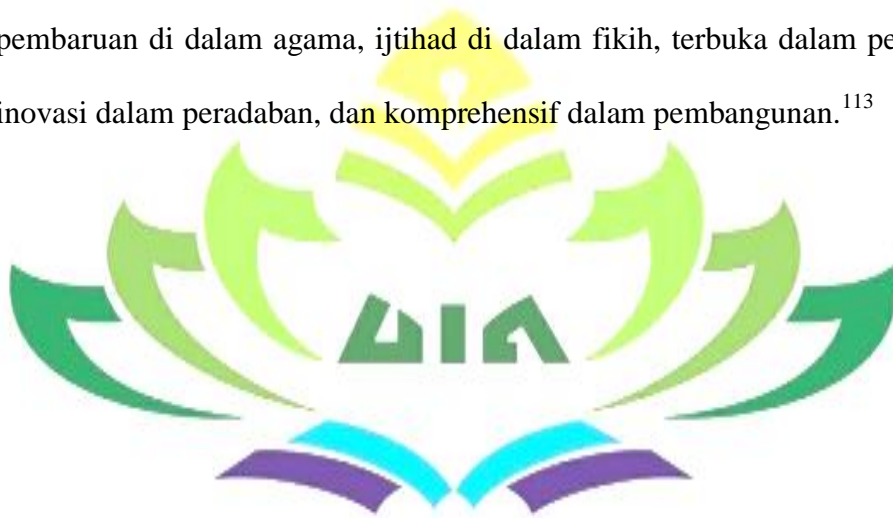
¹⁰⁸*Ibid*

¹⁰⁹*Ibid*, h.159

¹¹⁰*Ibid*

Untuk itu, ia percaya kepada kebudayaan yang universal, keutuhan, kemanusiaan, dan moralitas. Ia mengajak kepada kasih sayang bukan kebencian, toleransi bukan fanatisme, kelembutan bukan kekerasan, dialog bukan pertentangan, kebebasan bukan pemaksaan, kemajemukan bukan kemanunggalan, perdamaian bukan perang, dan rahmat bukan kebencian.¹¹²

Ditekankan dari itu adalah kepercayaan tentang pentingnya pembaruan di dalam agama, ijtihad di dalam fikih, terbuka dalam pemikiran, inovasi dalam peradaban, dan komprehensif dalam pembangunan.¹¹³



¹¹¹*Ibid*

¹¹²*Ibid*

BAB III

SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT KHILAFATUL MUSLIMIN

A. Latar Belakang, Tujuan Berdirinya, dan Perkembangan Khilafatul Muslimin

Sebagaimana telah kita fahami bersama bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah SWT, mentaati Rasul SAW dan Ulil Amri sesuai dengan firman Alloh (Q.S. An-Nisa : 59).

Ulil Amri umat Islam setelah wafatnya Rasul, tidak lain adalah kholifah / Amirul Mukminin adalah wajib *Ila yaumil Qiyamah* dan tidak boleh mengalami kekosongan sampai akhir zaman. Sesungguhnya ketaatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap individu di hadapan Allah SWT.

Bahwa khilafah Islamiyyah atau Khilafatul Muslimin adalah merupakan satu-satunya wadah bagi Jama'ah kaum Muslimin/Muslimah berdasarkan Ad-Dien, yang patut ditegakkan di muka bumi ini agar dapat segera terwujudnya masyarakat Islami yang menjadi cita-cita kita bersama. Selanjutnya kebebasan / kemerdekaan seluruh ummat baik itu Muslim maupun non-Muslim dalam melaksanakan peribadatan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing akan dapat tercapai.

Sejarah membuktikan bahwa kejayaan kaum muslimin di masa lampau dikarenakan ummat Islam mampu mempersatukan dan mempertahankan keutuhan ummat dengan sistem kepemimpinan Islam yaitu : Khilafah Islamiyyah dan membuktikan *Sam'an wa Tho'atan* kepada Ulil Amri (Khalifah/ Amirul Mu'minin). Adapun kemunduran dan kehancuran kaum Muslimin karena tidak

ada kemampuan untuk mempertahankan sistem ke-Khilafahan, yang berakibat ummat menjadi terpecah belah menjadi beberapa golongan dan bangga terhadap golongannya sendiri (*ashobiyah*). Fenomena ini merupakan kemusyrikan sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum (30) :32 yang artinya :

“Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya”.

Khilafatul Muslimin telah ada sejak Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq sampai ke-Khalifahan Turki Utsmani yang dihancurkan oleh Musthofa Kemal At-Taturk pada tahun 1924. Tetapi perjalanan kekhalifahan mengalami pasang surut, tidak semua sejalan dengan “*Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah*”. Usaha-usaha untuk membangun kembali ‘Khilafatul Muslimin” telah banyak dilakukan, namun tidak juga membuahkan hasil, adapun usaha yang pernah dilakukan antara lain pada tahun :

1. 1926, diadakan Kongres ke-Khalifahan (di Kairo).
2. 1926, Raja Ibnu Saud memperkasai Kongres Muslimin sedunia (di Makkah)
3. 1931, Konferensi Islam Sedunia (di Aqso/Yerussalem).
4. 1949, Konferensi Islam Internasional kedua (di Karachi)
5. 1951, Konferensi Islam Internasional ketiga (di Makkah)
6. 1964, Konferensi Muslim Sedunia di Makkah
7. 1969, Pertemuan Puncak yang melahirkan Organisasi Konferensi Islam disingkat OKI (di Rabat)

8. 1974, diadakan KTT negara-negara Islam (di Lahore), dalam kesempatan ini Presiden dari beberapa negara Islam seperti Uganda, Mesir, Yaman Utara, dan Libya, mengusulkan agar Raja Faisal dari Arab Saudi menjadi Khalifah / Amirul Mu'minin, tetapi tidak bersedia.
9. Pada tahun 1905 di Indonesia yang dipelopori oleh Samanhudi, didirikanlah Syarikat Dagang Islam (SDI), kemudian Syarikat Dagang Islam dirubah oleh HOS Cokroaminoto menjadi Syarikat Islam (SI), pada tahun 1912, Syarikat Islam ditingkatkan menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan akhirnya oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo diplokanirkan NII 12 Syawal 1368 H / 7 Agustus 1949, naskah Proklamasinya tersimpan di PBB.
10. Tahun 2000, diadakan muktamar Ummat Islam di Yogyakarta dihadiri sekitar 2000 peserta dari dalam dan luar negeri.

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa kekhalifahan tetap merupakan cita-cita kaum Muslimin sedunia, namun upaya pengembalian melalui kongres / konferensi belum juga terwujud.

Ulil Amri bagi ummat Islam wajib ada sebagai pengamalan Al-Qur'an surat An-Nisa' ; 59, dan perlu segera kita tegakkan sistem kekhalifahan/kepemimpinan Islam, sebagai solusi terwujudnya Wihdatul Ummah, dan untuk melaksanakan hal ini perlu keberanian dari ummat Islam itu sendiri.

Maka dengan sadar dan tawadhu' serta takut kepada Allah, Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja', memelopori dan sekaligus mengisi kekosongan Ulil

Amri / Khalifah yang dimaklumkan ke seluruh dunia 13 Rabiul Awwal 1418 H/ 18 Juli 1997 M.

Pada kongres Mujahidin I Indonesia dalam rangka Penegakkan Syari'at Islam di Yogyakarta 5-7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan 5-7 Agustus 2000 M, dihadiri ummat Islam dari dalam dan luar negeri, Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja', membacakan kembali maklumat dan menyarankan agar peserta kongres memilih, menunjuk Khalifah / Ulil Amri yang legitimet, tapi rupanya peserta kongres hanya memberikan dukungan serta menetapkan kriteria seorang Imam, tanpa menunjuk seorang menjadi Khalifah Ulil Amri sebagaimana yang diusulkan.

Tujuan dari setiap kelompok da'wah adalah sama yakni menegakkan Syari'at Islam hanya nama saja yang membedakan. Dalam rangka menegakkan Syari'at Islam kita wajib bersatu menjadi satu wadah dan satu Imamah (*an aqimuddiina walaatatafarroqu fih* (QS. (42) : 13). Banyaknya kelompok adalah fenomena perpecahan. Banyaknya nama membuat banyaknya perpecahan. Setelah kenabian, nama terhadap system Islam adalah Khilafah, beda nama akan membedakan makna dan sifat. Nama dalam Islam adalah sesuatu yang sangat berarti dan merupakan sebuah do'a.¹¹⁴

Berdasarkan hasil dari penelusuran sejarah mengenai munculnya gerakan Khilafatul Muslimin, didapati latar belakang bahwa masyarakat kita (umat Islam) saat ini terpecah belah. Banyak golongan-golongan yang terbentuk sehingga praktek dalam beragama menjadi beraneka-ragam. Seperti disebut di

¹¹³Kalender Khilafatul Muslimin 1439 H

atas, perjuangan penegakkan sistem Khilafah sudah dimulai sejak zaman H.O.S Cokro Aminoto memimpin Syarekat Islam. Muridnya yang bernama Imam Kartosuwiryo memulai gerakan dengan lebih nyata. Imam Kartosuwiryo yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendiri Negara Islam Indonesia (NII) ingin menegakkan kembali sistem kekhilafahan. Tetapi pada saat itu momen yang ada adalah sebuah bentuk negara, maka Imam Kartosuwiryo mencoba memulai dari negara. Alasannya sudah pada saat itu, ketika Belanda masuk ke Indonesia untuk kedua kalinya, saat itu kepemimpinan RI kosong dan Indonesia menjadi pecah hingga muncul negara Pasundan dan lain sebagainya.

Imam Kartosuwiryo selanjutnya berinisiatif memulai gerakan ini dari sebuah *Daulah* (negara), dan maklumat daulah (NII) ada di PBB. Hal itu menunjukkan secara hukum NII pernah ada dan cita-cita Imam Kartosuwiryo pun tidak hanya sampai pendirian Negara Islam tetapi lebih dari itu yakni Kekhilafahan akan tegak kembali. Karena kondisi politik saat itu sangat kacau, di sisi lain ada pihak yang tidak menginginkan Islam menjadi tatanan budaya sangat kuat hingga menjadikan NII sebagai sebuah makar terhadap Negara RI.

Era rezim Soekarno saat itu sangat ketakutan akan berdirinya Negara Islam, sehingga dengan segala upaya NII di berantas dengan kekuatan senjata. Setelah Imam SM. Kartosuwiryo sudah tak lagi memimpin akibat hukuman matinya oleh pemerintah, maka kepemimpinan dilanjutkan Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dari Aceh. Fase berikutnya, kepemimpinan jamaah ummat Islam dan perjuangan mendirikan sistem Kekhilafahan di Indonesia dilimpahkan kepada Buya Zainali. Namun pada periode ini NII terpecah. Sehingga muncul

faksi-faksi dalam tubuh NII. Setelah Buya Zainali berhenti, Abdul Qadir Hasan Baraja didaulat oleh jamaah NII untuk memimpin jamaah. Akan tetapi kondisi politik di bawah kendali rezim Otoriter saat itu mengakibatkan Abdul Qadir Hasan Baraja menjadi tahanan Politik. Kepemimpinan diserahkan kepada Abdurrahman. Beliau mencoba menjalankan amanah tersebut namun karena begitu banyaknya permasalahan, sehingga abdurrahman mengembalikan kepemimpinan kepada Abdul Qadir Hasan Baraja. Pada saat yang sama Abdul Qadir Hasan Baraja masih sebagai tahanan politik hingga pada akhir tahun 1999. Setelah Abdul Qadir Hasan Baraja bebas, dia memprakarsai pertemuan para pejuang Islam yang ingin menegakkan Syariat Islam, yang dikenal dengan Kongres Mujahidin tahun 2000 di Yogyakarta. Pada pertemuan ini di hadiri oleh perwakilan-perwakilan umat Islam baik dari golongan maupun ormas, bahkan beberapa perwakilan dari luar negeri seperti perwakilan Islam dari Philipina, Singapura, Malaysia, Syiria, Thailand. Kongres ini di hadiri 2000 umat Islam.

Pada kongres tersebut Baraja memaklumkan kembali tegaknya Khilafah, dan mempersilahkan peserta Kongres untuk memilih salah satu dari peserta untuk dijadikan pemimpin sehingga umat akan berada dalam satu kepemimpinan. Peserta kongres menyetujui tentang pentingnya umat berada dalam satu kepemimpinan. Namun peserta Kongres tidak sanggup untuk memulainya saat ini, dan mempersilahkan Abdul Qadir Hasan Baraja untuk memulainya. Hasil Kongres tersebut menyatakan bahwa mereka sepakat tentang sebuah kepemimpinan dalam Islam menggunakan Kekhilafahan, namun mereka belum akan memulai atau baru sebatas mencita-citakan. Hasil Kongres yang

diharapkan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja tidak tercapai dan hanya memunculkan aliansi Umat Islam. Orang-orang yang setuju dengan Abdul Qadir Hasan Baraja akan terus dengan sistem awal yaitu sistem Khilafah, adapun yang tidak setuju membentuk aliansi Umat Islam dalam sebuah organisasi yang saat ini dikenal dengan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).¹¹⁵

Struktur kekuasaan yang akan dibentuk dalam menjalankan kekuasaan dalam negara Islam atau jamaah yang hendak diwujudkan menyesuaikan dengan kebutuhan untuk melayani umat. Struktur merupakan pembagian tugas yang harus mendengarkan dan mematuhi khalifah. Dalam menjalankan amanah umat, beban tanggung jawab seorang Khalifah begitu besar. Sehingga diperlukan pembagian tugas dalam rangka merealisasikan dan menjaga hukum Allah agar tetap tegak. Seorang Imam atau Khalifah harus pandai dan ahli *ijtihad* (seorang *mujtahid*) dan untuk mencegah semaksimal mungkin kekeliruan-kekeliruan/kesalahan-kesalahan dalam hal tersebut maka ia perlu didampingi oleh beberapa orang terpercaya yang jujur dan tulus serta mengerti benar ilmu Al-Qur'an dan Hadist sebagai standar kebenaran. Mereka inilah yang akan mengambil berbagai keputusan ijtihad melalui musyawarah mereka sebagai Dewan Imamah (para *mustasyar*). Selain mereka yang berada disekeliling Imam (Dewan Imamah) yang senantiasa membantu imam berfikir memecahkan berbagai persoalan penting demi kemaslahatan Islam dan umatnya. Seorang Imam juga memerlukan para pembantu lainnya, sesuai dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam, sebagai kaki tangan Imam yang bertindak mewakili Imam dalam pembinaan umat ke arah kesadaran dan

¹¹⁴ Maklumat Terbentuknya Kembali Khilafah Islamiyah oleh Khilafatul Muslimin Tahun 1418 H/1997 M.

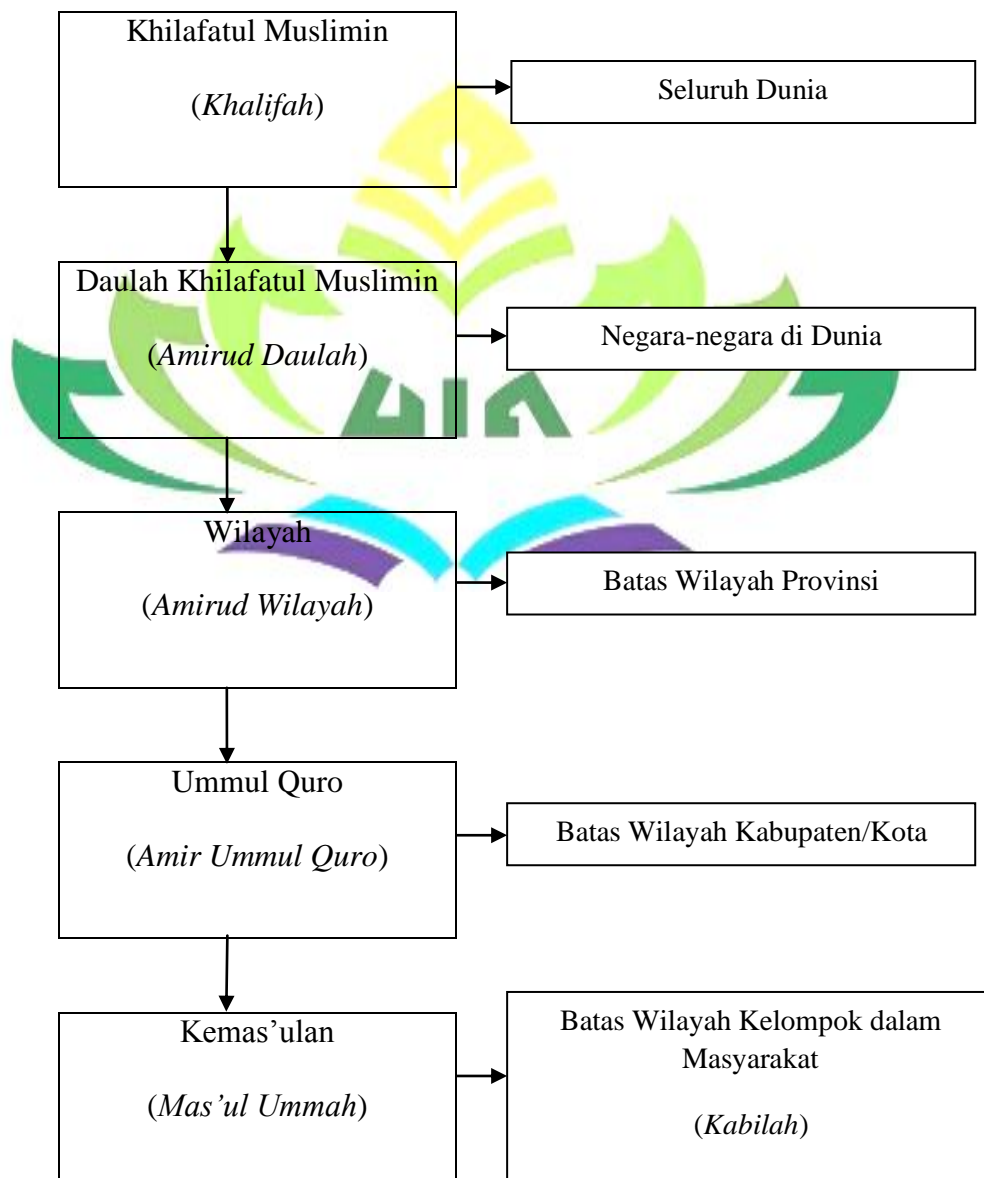
ketulusan *sam'an wa tha'atan* terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya serta *Ulil Amri* mereka.

Para amir yang mewakili Imam di seluruh daerah/wilayah kekuasaan Islam berkewajiban menyampaikan seluruh amanat Imam atas perintahnya dan mereka harus dapat mempertanggung jawabkan segala aktivitas mereka sebagai Amir dihadapan Imam/Khalifah. Para Amir di seluruh wilayah tersebut diangkat atas keputusan Imam berdasarkan berbagai pertimbangan yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Imam dihadapan Allah SWT. Imam memiliki alasan-alasan dan pertimbangan sehingga ia mengangkat ataupun memecat seorang Amir. Tentunya para Amir tersebut terdiri dari orang-orang yang memahami Islam secara baik di samping sifat tawadhu' dan ketulusan hati yang mereka miliki sehingga mampu membina umat ke arah yang dikehendaki ajaran Islam.

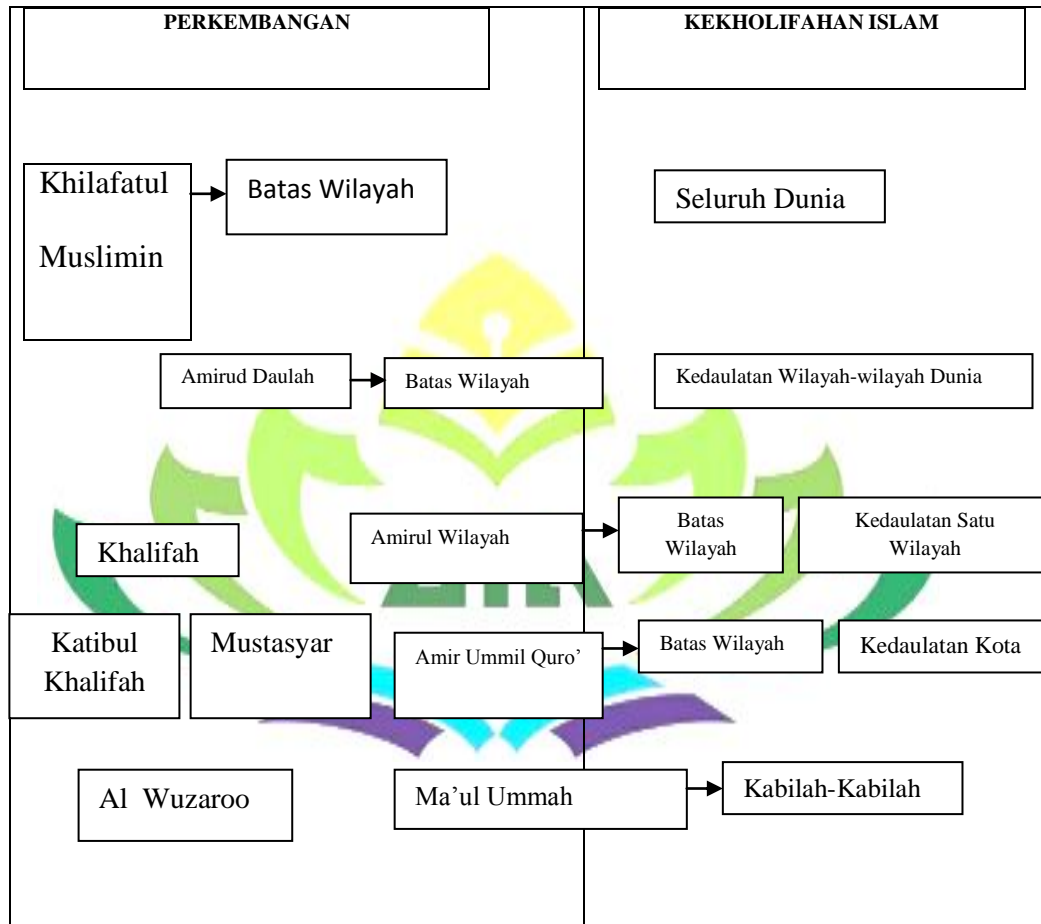
Terealisasinya ketaatan umat secara sadar terhadap *Ulil Amri* sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya wajib diupayakan semaksimal mungkin melalui pembinaan oleh para Amir di setiap daerah/wilayah dengan cara membekali mereka ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman/pengertian mereka terhadap ajaran Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Kelengkapan struktur Amir dari tingkat wilayah yang paling tinggi sampai ke tingkat desa yang paling rendah adalah sangat penting untuk mencapai kemudahan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas *Ulil Amri/Imam*, sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan umat secara merata. Pembentukan dan pemekaran struktur kekuasaan berdasarkan pada kesepakatan umat. Para pemimpin di setiap tingkatan

kekuasaan wajib melakukan pembinaan terhadap umat dalam hal penegakan hukum Allah. Pemimpin juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Struktur. 1
Struktur Kekuasaan
Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung



Struktur. 2
Struktur Perkembangan Kekholifahan
Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung



Adapun tentang pengelolaan bumi/memakmurkannya berdasarkan keahlian-keahlian tertentu secara profesional, maka bidang keahlian dimaksud wajib diserahkan kepada ahlinya. Agar tidak terjadi salah satu urusan yang bakal merugikan rakyat dan alam. Untuk menempatkan orang-orang tertentu pada keahlian mereka masing-masing yang bertugas membantu Imam dalam meningkatkan kemampuan rakyatnya disegala bidang Khalifah berkewajiban mengangkat mereka yang sering disebut *wazir/wuzara* atau para menteri. Mereka

semua langsung berhubungan dengan rakyat sesuai kemungkinan yang ada berdasarkan situasi dan kondisi agar dapat membimbing rakyat meningkatkan profesionalisme mereka dalam segala bidang yang dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan Islam dan umatnya. Para menteri di masing-masing bidang bertugas menurut keahliannya dalam bidang-bidang yang dibutuhkan dalam pemerintahan Islam demi terlaksanya hukum/syariat Islam secara sempurna di masyarakat. Menteri utama yang diperlukan terlebih dahulu dalam jamaah untuk mengurus kebutuhan umat diantaranya:

1. Menteri keuangan
2. Menteri Kehakiman
3. Menteri Pendidikan¹¹⁶

Pada setiap tingkatan kekuasaan yang dipimpin oleh seorang Amir, terdapat beberapa orang petugas yang diperuntukkan untuk membantu kinerja Amir. Perangkat kerja tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing tingkatan. Pengurus Pusat Khilafatul Muslimin yang berkantor di Bandar Lampung memiliki 10 bagian perangkat kerja untuk mendukung tugas-tugas Khalifah untuk mengurus umat. Perangkat kerja tersebut diantaranya yakni:

1. Sekretaris Khalifah (*Katibul Khalifah*)
2. Dewan Penasehat (*Mustasyar*)
3. Departemen Pendidikan dan Pembinaan
4. Departemen Pendataan Umat dan Inventaris
5. Departemen Baitul Mal, Urusan Zakat, Dan Infaq

¹¹⁵ Abdul Qadir Hasan Baraja, *Gambaran Global Pemerintahan Islam*, (Bandar Lampung : Al Khilafah, 1435 H), h. 68

6. Departemen Pengawas Baitul Mal
7. Departemen Pemberdayaan Ekonomi Umat
8. Departemen Pertahanan dan Keamanan
9. Departemen Olah Raga dan Kesehatan
10. Departemen Hubungan Masyarakat¹¹⁷

B. Negara Islam dan Khilafah Menurut Khilafatul Muslimin

Kepemimpinan memang sangat dibutuhkan bagi setiap kelompok masyarakat (kecil ataupun besar). Hanya melalui kepemimpinan setiap permasalahan yang timbul dalam suatu masyarakat dapat diselesaikan. Sehingga seorang pemimpin adalah orang yang terpandang di antara anggota masyarakat dan berhak mendapat penghormatan mereka. Setiap perselisihan yang terjadi dan tidak dapat terselesaikan secara pribadi akan di atasi secara baik dengan jalan menyerahkannya kepada pemimpin, sehingga dimungkinkan tercegahnya tindakan kekerasan yang melawan hukum dan kekacauan-kekacauan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Kepemimpinan harus dijalankan dalam sebuah institusi semacam negara agar daya berlakunya menyeluruh berbagai aspek dan meluas. Abdul Qadir Hasan menerangkan bahwa dasar pembenaran pembentukan negara atau Kepemimpinan Islam adalah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Abdul Qadir Hasan Baraja menjelaskan bahwasannya tidak ada negara Islam, yang ada hanya negara dan dipimpin oleh satu kepemimpinan.¹¹⁸

¹¹⁶Perkembangan Kekholifahan Islam di Khilafatul Muslimin

¹¹⁷Abdul Qadir Hasan Baraja, wawancara dengan penulis, Kantor Pusat Khilafatul Muslimin, Bandar Lampung, 20 September 2018

Abdul Qadir Hasan Baraja secara khusus menyebut Surat An-Nisa : 59, sebagai perintah Allah yang jelas untuk membentuk kepemimpinan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (As-Sunnah) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik dari akibatnya”. (QS. 4:59).¹¹⁹

Setiap muslim, siapapun dia, dan di manapun ia berada wajib berada dalam satu kesatuan jamaah di bawah kepemimpinan Ulil Amri Minkum (Ulil Amri dari orang-orang yang beriman) dan tidak boleh ada golongan umat Islam yang memisahkan diri dari jamaah dan *imamah*. Dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW banyak yang mewajibkan umat Islam berjama’ah di bawah Ulil Amri dan melarang mereka secara mutlak berpecah belah. Kepemimpinan Ulil Amri dapat menerapkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam dan tidak ditundukkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Tidak pula mematuhi ketentuan-ketentuan hukum/perundang-undangan yang tidak bersumberkan pada ajaran Allah SWT dan Rasul atau bertentangan dengan ajaran Islam. Perintah untuk tidak berpecah belah tertuang dalam Surat Ali-Imran ayat 105 :

¹¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Kode*,(Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013), h. 87.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat”. (QS. 3:105)¹²⁰

Sedangkan anjuran Rasulullah untuk bersatu disebutkan dalam Hadist:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harits telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar dia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang menarik tangannya dari ketaatan (kepada imam muslimin) maka dia tidak memiliki alasan pada hari kiamat. Dan barangsiapa mati dalam keadaan berpisah dengan jamaah muslimin, dia mati dalam keadaan jahiliyah.” (HR. Muslim No. Hadis 1851).¹²¹

Pemaparan tentang konsep kepemimpinan yang baru diwujudkan di bumi ini dengan mencontoh kisah Nabi diterangkan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja bahwa dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW seluruh umat dipimpin oleh seorang nabi sistemnya disebut *Minhaj An-Nubuwwah*. Saat itu tidak ada lagi kepemimpinan umat Islam mengadopsi metode kepemimpinan

¹¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.63

¹²¹Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhhis Sholihin, Syaikh Abu Usamah Salim bin 'Ied Al Hilali, terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama, 1430 H, h.655

dalam mewujudkan dan menjalankan kepemimpinan Islam atau disebut Sistem Kekhilafahan.¹²²

Pernyataan dari Khalifah (Ketua/pemimpin) tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Khalifah (*Katibul Khalifah*), Imam Syaukani. Dia menjelaskan pada dasarnya dalam konsep Islam bersatu itu disebut berjamaah. Berjamaah sebagai perintah Allah, maka pelaksanaannya harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Petunjuk yang dijabarkan dalam Islam dilaksanakan melalui satu sistem jamaah. Dahulu pada zaman nabi sistem ini disebut sistem *Minhaj An-Nubuwwah* dipimpin oleh seorang Nabi menegakkan atau melaksanakan Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan mencari Ridho Allah. Sehingga dapat disimpulkan pada waktu itu sistem berjamaah sebagai pembedanya, institusinya adalah *An-Nubuwwah*, Pemimpinnya Nabi, Konstitusinya Sunnah, serta di tujukan untuk mencari Keridhoan Allah SWT. Hal ini ternyata berlaku sejak nabi-nabi sebelumnya.¹²³

Sedangkan menurut pendapat Amir (pemimpin) Khilafatul Muslimin wilayah Lampung Selatan, Musthafa Jailani yang mengungkapkan Khilafah adalah paham universalisme dalam kepemimpinan umat muslim yang bermakna adanya satu manajemen dalam mengelola umat Islam sedunia. Dasar pembedaan pembentukan sistem ini melihat firman Allah dalam Surat Al-Anfal ayat 73 :

¹²¹ Abdul Qadir Hasan Baraja, wawancara dengan penulis, Kantor Pusat Khilafatul Muslimin, Bandar Lampung, 20 September 2018

¹²² Moh. Rizky Godzali, "Konsepsi Negara Islam Menurut Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia Dan Khilafatul Muslimin". (Skripsi Program Sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012), h. 109

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

كَبِيرٌ

Artinya: “Adapun orang-orang kafir sebagian dari mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain jika kamu (hai para Muslim) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar”. (QS. 8:73)¹²⁴

Pada realitasnya, orang-orang yang tidak suka terhadap Islam mereka bahu-membahu untuk bagaimana memerangi Islam (dilihat dari segi tolong-menolong). Sedangkan umat Islam terus berada dalam kondisi difitnah. Setiap ada permasalahan di dunia, umat muslimin selalu disudutkan. Umat muslimin berikutnya selalu dianggap sebagai awal dari anarkisme dan terorisme. Tidak tegaknya syariah Allah di muka bumi menyebabkan kerusakan yang sangat besar menimpa umat Islam. Ini sebagai akibat hilangnya kekuatan dari bersatu.¹²⁵

Allah sebagai pemilik agama mengatur tata cara menjalankan kehidupan di semua aspek, termasuk dalam pengelolaan kekuasaan yang ditujukan agar hukum Allah tetap berjalan di masyarakat. Abdul Qadir Hasan Baraja lebih rinci mengatakan:

“Setiap diri pribadi muslim diwajibkan untuk mentaati ajaran agama secara Kaffah (menyeluruh). Ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur’an. Setiap ajaran harus memiliki institusi untuk mengatur dan mengurus wilayah kekuasaan agar ajaran dipatuhi dan terciptanya ketertiban. Institusi yang terbentuk untuk mengurus kehidupan umat Islam haruslah sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an. Konstitusi dan Substansi yang menyelimuti institusi tersebut juga harus berdasarkan perintah Allah dalam Al-Qur’an. Orang beriman harus ada pemimpinnya, jika tidak maka akan terjadi kekacauan. Inipun adalah perintah Allah bukan keinginan Khilafatul Muslimin secara organisasi semata. Apapun

¹²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 59.

¹²⁴Moh. Rizky Godzali, *Op. Cit.*, h. 110

yang dikerjakan umat Muslim di dunia ini haruslah bercirikan Islami atupun memiliki tujuan sebagai sarana ibadah. Pembentukan kepemimpinan Islam juga bagian dari ibadah kepada Allah (meningkatkan keimanan dan ketaqwaan) ”.

Dia menuturkan bahwa firman Allah pada QS. Al-Baqarah ayat 30 sangat jelas tentang dijadikannya manusia sebagai Khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah memiliki tugas melaksanakan perintah Allah dan menegakkan hukum-hukum Allah. Tidak melaksanakan dan menegakkan hukum Allah berarti tidak memfungsikan dirinya sebagai khalifah. Tidak melaksanakan amanah Allah berarti dia seorang yang mengkhianati perintah Allah atau ketetapan Allah SWT.¹²⁶

Khilafah Sebagai Sistem Pemerintahan

Abdul Qadir Hasan Baraja menegaskan :

“Khilafah itu bebas artinya membebaskan segala sesuatunya dengan syarat tidak melanggar dari aturan Allah dan Rasul (Al-Qur’an dan As-Sunnah).”¹²⁷

حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا وَمَنْ يَا أَبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Yunus dan Suraij mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Hilal bin ‘Ali dari ‘Atho’ bin Yasar dari Abu Hurairah berkata; Bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Pada hari kiamat setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, “para sahabat berkata; “Siapa yang enggan wahai Rasulullah?” beliau bersabda: “Barangsiapa taat kepadaku maka akan masuk surga, dan

¹²⁵ Abdul Qadir Hasan Baraja, wawancara dengan penulis, Kantor Pusat Khilafatul Muslimin, Bandar Lampung, 20 September 2018

¹²⁶ Abdul Qadir Hasan Baraja, wawancara dengan penulis, Kantor Pusat Khilafatul Muslimin, Bandar Lampung, 20 September 2018

barangsiapa durhaka maka ia telah enggan.” (HR. Bukhari No. Hadis 6737).¹²⁸

Suatu kekuasaan di wilayah yang berdaulat diwajibkan untuk mempertahankan dan menegakkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang telah dicontohkan penerapannya secara baik oleh utusan-Nya (Nabi Muhammad SAW) di muka bumi ini untuk sekalian manusia demi kesejahteraan hidup mereka lahir dan batin, serta sebagai rahmat bagi sekalian alam. Para penguasa adalah pengemban amanat Allah di atas dunia ini yang disebut Ulil Amri dari orang-orang yang beriman. Mereka berkewajiban menuntun dan mengarahkan umat manusia pada penyerahan diri hanya kepada Allah semata sebagai Khaliq (pencipta), untuk sepenuhnya tunduk dan patuh kepada segala perintah/larangan Allah dan Rasul-Nya.

Bagi gerakan Khilafatul Muslimin, pemerintahan di negara Islam dipimpin oleh Ulil Amri. Dia bukan sekedar pemimpin sebuah organisasi, bukan pemimpin suatu partai/perhimpunan ataupun golongan tertentu. Mereka adalah para penguasa yang terdiri dari orang-orang beriman, dimulai dari seorang Imam/Khalifah beserta staf-stafnya yang mempunyai kekuasaan atas seluruh kaum muslimin di muka bumi ini, dan semua golongan masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya hanya untuk memimpin/menerapkan syariat Islam, mendidik, dan mengarahkan umat serta membimbing mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil senantiasa bersumberkan Al-Qur'an dan Hadits dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

¹²⁸Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam bab Musnad Abu Hurairah Radliyallahu'anhu, Al-Alamiyah No. Hadis 8373.

Ulil Amri beserta kaum muslimin yang tunduk dan patuh di bawah kepemimpinannya itulah mereka yang disebut berada dalam satu jama'ah di bawah satu kepemimpinan yang wajib ditegakkan dan setiap muslim di manapun berada wajib mendaftarkan diri sebagai anggota atau warganya dan diharamkan berpecah belah ataupun hidup liar di luar jama'ah yang dimaksud.

Kekhalifahan adalah satu-satunya istilah yang paling tepat bagi kepemimpinan Islam di muka bumi ini sampai hari kiamat. Kekhalifahan adalah sistem pemerintahan yang baik yang memungkinkan tercapainya ketentraman kebahagiaan hidup umat serta mencegah kerusakan di muka bumi, akibat ulah-ulah manusia itu sendiri dikarenakan adanya aturan dan perundang-undangan yang mereka buat sendiri tanpa petunjuk dari Allah yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana.¹²⁹

Pemerintahan Islam di bawah seorang Khalifah adalah pemerintahan Islam sedunia yang memusuhi setiap bentuk kedzoliman dan menentang kemungkaran dari siapapun datangnya, dan karenanya bila terjadi kecurangan dan kedurhakaan yang diperintahkan oleh para penguasa, maka setiap individu/seluruh rakyat berkewajiban membangkang/menolak perintah tersebut untuk dilaksanakan, namun pemberontakan tetap tidak dapat dibenarkan. Untuk kelancaran tugas Imam/Khalifah/Amirul Mukminin, maka harus dipilih para pembantunya/wazir/wuzara dalam berbagai bidang keahlian untuk bertindak secara profesional agar tercegah kedzoliman dan ketidakadilan dalam kehidupan, sebab tidak seorangpun manusia di muka bumi ini yang dapat/mampu menguasai

¹²⁸ Abdul Qadir Hasan Baraja, *Op.cit*, h. 59

seluruh bidang ilmu pengetahuan dan keahlian. Para pembantu Imam tersebut terdiri dari :

1. Menteri Keuangan- membawahi sebuah badan yang mengelola kekayaan pemerintahan Islam yang mengelola keuangan yang disebut Baitul Mal. Seluruh kekayaan pemerintahan yang dikumpulkan di Baitul Mal yang didapat dari berbagai sumber yang halal menurut Allah dan Rasul-Nya seperti zakat infaq, pajak, ahli kitab, keuntungan perusahaan negara, harta sitaan pemerintah, ghanimah dan lain-lain.
2. Menteri Kehakiman – para hakim dalam Islam berkewajiban melaksanakan hukum sesuai dengan dasar/sumber hukum yang berlaku yakni Al-Qur'an Al-Hadits dalam segala kasus dan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat, baik pidana maupun perdata. Mereka tidak berhak menentukan sendiri vonis/hukuman bagi suatu tindak kriminal dan delik hukum, sebab para hakim itu tidak berhak mengampuni dosa seseorang dan tidak pula berhak mengazab (menganjar) dosa seseorang kecuali Allah SWT saja.
3. Menteri Pendidikan – dalam rangka meningkatkan kemampuan warga kekhalifahan Islam di segala bidang, maka pendidikan merupakan sarana pokok dan kebutuhan utama masyarakat secara cuma-cuma dengan segala fasilitasnya, sedang para tenaga kerja/pengajarnya dari mereka yang berilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing berkewajiban menyampaikan/memberitahukan ilmu kepada orang yang berhak

menerima dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan bayaran dari orang penuntutnya karena jual-beli.

Abdul Qadir Hasan Baraja secara khusus menjelaskan bahwasannya Khilafah itu sistem kehidupan global (sistem kebersamaan) bagi keseluruhan umat Islam dalam rangka mempersatukan umat Islam untuk meningkatkan Iman dan memperluas ketaqwaannya.¹³⁰

C. Ajaran-ajaran Khilafatul Muslimin

1. Bai'at menurut Khilafatul Muslimin

a. Definisi dan Pengertian Bai'at

Bai'at menurut bahasa Arab adalah asal kata (ba'a-yabi'u) yaitu artinya menjual. Bai'at artinya penjualan atau jual-beli. Menurut istilah ialah suatu perjanjian terhadap Allah SWT yang wajib dipenuhi atau dipatuhi oleh seorang hamba untuk mendapatkan balasan dari sisi-Nya.

Pelaksanaan bai'at kepada Rasulullah dan kepada imam/khalifah. Firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ فَسْیُوتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠٦﴾

¹²⁹ Abdul Qadir Hasan Baraja, wawancara dengan penulis, Kantor Pusat Khilafatul Muslimin, Bandar Lampung, 20 September 2018

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berbai’at kepadamu hanyalah berbai’at kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barangsiapa yang merusak (bai’atnya) berarti merusak dirinya sendiri dan barangsiapa yang menepati janjinya kepada Allah maka dia akan diberi pahala besar.” (QS. Al-Fath : 10)¹³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa :

Rasulullah adalah tempat berbai’at

- 1) Haram mengkhianati bai’at
- 2) Wajib menepati bai’at

Karena bai’at itu sebenarnya janji-janji seorang mukmin kepada Allah, maka Rasulullah SAW sebagai pelaksana hanyalah berfungsi sebagai saksi, maka tidak terdapat ketentuan sejumlah saksi tambahan dan Allah Maha Mengetahui siapa yang mengkhianati ataupun menepatinya. Hanya Allah yang berhak membalasnya, bukan Rasulullah yang berstatus sebagai saksi yang berkewajiban membalas atau memberi ganjaran bai’at. Oleh karena itu setiap orang yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW (imam/khalifah) berhak menjadi pelaksana bai’at demi merealisasikan ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan bermasyarakat.

Sesuai dengan arti kata bai’at maka ia juga merupakan transaksi jual beli yang konsekwensinya menuntut suatu pengorbanan di satu pihak untuk mendapatkan pembayaran dari pihak lain. Tanpa suatu pengorbanan, berarti bai’at tidak terpenuhi dan bernilai mengingkari bai’at. Maka harus ada yang dijual untuk

¹³⁰ Abdul Qadir Hasan Baraja, *Op.Cit*, h. 28

memenuhi transaksi yang diadakan agar pembelinya membayar harga barang yang dikorbankan. Allah SWT berfirman: ¹³²

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah membeli dari mukminin diri mereka dan harta mereka dengan Surga bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah lalu membunuh atau terbunuh sebagai janji pasti dari Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah kalian dengan jual beli kalian yang telah kalian janjikan terhadap Allah dan itulah keberuntungan yang besar”. (QS. At-Taubah: 111)¹³³

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa Surga merupakan pembayaran daripada yang telah dijual atau dikorbankan di jalan Allah. Maka bai’at seorang mukmin hanya akan berfungsi sebagai transaksi jual beli yang berhak mendapatkan bayaran, jika terdapat bukti pengorbanannya di jalan Allah secara sadar dan tulus.¹³⁴

¹³¹ *Ibid*, h. 29

¹³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.

¹³³ Abdul Qadir Hasan Baraja, *Op.Cit*, h. 30

b. Isi Bai'at dan Macam-macamnya

Bai'at berfungsi sebagai suatu perjanjian yang mengikat, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maka isinya pun berubah-ubah menurut kepentingannya. Oleh karena itu para sahabat yang berbai'at kepada Rasulullah SAW pun tidak senantiasa mengucapkan kalimat yang sama, kecuali dalam kepentingan dan kondisi yang sama. Baitul Aqabah, Bai'at Ar-Ridwan, bai'at para wanita berhijrah, bai'at sewaktu-waktu yang ditawarkan oleh Rasulullah, seluruh isi sesuai dengan kepentingannya.¹³⁵

c. Hukum Bai'at dan Konsukensinya

Hukumnya berubah-ubah menurut kepentingannya. Apabila bai'at dimaksudkan untuk tujuan menerima ajaran Islam sebagai keyakinan seseorang dengan tekad akan senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri, sedang ia berada dibawah kekuasaan jahiliyah (hidup dalam pemerintahan non Islam) maka wajib 'ain atas setiap pribadi menyatakan bai'atnya kepada imam atau orang yang berhak, agar ia dapat berhijrah menjadi warga pemerintahan Islam yang berkewajiban *sam'an wa tha'atan*¹³⁶ terhadap ulil amri dalam kehidupan berjama'ah. Apabila tidak menyatakan bai'at kepada yang berhak, maka ia hidup liar di luar jama'ah dan matinya disebut mati jahiliyah.

Rasulullah SAW bersabda :

¹³⁴*Ibid*, h. 31

¹³⁵*Ibid*, h. 35

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Khalid bin Harits telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar dia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang menarik tangannya dari ketaatan (kepada imam muslimin) maka dia tidak memiliki alasan pada hari kiamat. Dan barangsiapa mati dalam keadaan berpisah dengan jamaah muslimin, dia mati dalam keadaan jahiliyah.” (HR. Bukhari No. Hadis 2710).¹³⁷

Namun jika seorang muslim hidup dalam pemerintahan Islam dibawah kekuasaan ulil amri, maka ia secara langsung adalah warga pemerintahan Islam karena telah dapat mentaati Allah, mentaati Rasulullah dan ulil amri orang-orang beriman, serta ia telah diatur dalam kehidupan berjama'ah karenanya pernyataan bai'at baginya tidak wajib 'ain lagi tetapi wajib kifayah, adapun kewajiban *sam'an wa tha'atan* terhadap imam/khalifah adalah dalam segala hal yang ma'ruf yang diperintakkannya kecuali perintah maksiat.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ اللَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ
 إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

¹³⁷Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-ahkam, jilid 4 , h.2856

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Mendengar dan ta'at adalah wajib atas setiap Muslim baik dalam perkara yang ia sukai atau pun yang ia benci kecuali jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak ada (kewajiban) mendengar dan tidak pula taat.” (HR. At tirmidzi No. Hadis 1707).¹³⁸

Mendengar dan taat terhadap imam/khalifah merupakan konsekuensi logis dari bai'at seseorang kepadanya dan telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tanpa pembuktian taat maka seorang muslim tidak mengambil bagian apa-apa dari pernyataannya, bahkan jika ternyata ia dengan sengaja tidak mentaati perintah ulil amrinya maka ia telah maksiat atau berbuat dosa.¹³⁹

2. Jihad Menurut Khilafatul Muslimin

a. Pengertian Jihad

Jihad berasal dari kata kerja “*jahad-yajihadu*” atau “*jaahada – yujahidu – mujahadatan*” artinya bersungguh-sungguh. Jihad atau *mujahadah* artinya kesungguhan. Di maksudkan dengan jihad ialah kesungguhan melaksanakan ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

¹³⁸ Dikeluarkan oleh Imam At tirmidzi dalam kitab al jami'us shahih huwa sunan tirmidzi, al juz ar rabi', jilid 4, daarul kitab al'alamiyah, beirut-libanon, h.182

¹³⁹ Abdul Qadir Hasan Baraja, *Op.Cit*, h. 36

Artinya:“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Ankabut: 69)¹⁴⁰

Bersungguh-sungguh di jalan Allah adalah dalam melaksanakan ajaran-Nya sebagai orang yang berbuat baik atas dasar imam berharap ridha Allah SWT, dimana kesungguhan demikian itu bila dilaksanakan semaksimal kemampuan, maka pasti akan ditolong Allah ke jalan kesuksesannya.¹⁴¹

b. Hukum Jihad

1) Wajib Kifayah

Apabila umat Islam yang hidup di dalam wilayah kekuasaan Islam (wilayah yang sumber hukum dan perundang-undangnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits) berkewajiban menghadapi musuh-musuh Islam di luar wilayah kaum muslimin. Wajib *kifayah* ini ditunjuki oleh¹⁴² beberapa ayat berikut:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

¹³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 404.

¹⁴⁰Abdul Qadir Hasan Baraja, *Iman Hijrah Jihad*, (Bandar Lampung: Pustaka Al-Khilafah, Rajab 1434 H), h. 57

¹⁴¹*Ibid*, h. 81

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (QS. At-Taubah: 122-123)¹⁴³

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman dalam wilayah Islam, tidak seharusnya pergi ke medan tempur seluruhnya untuk memerangi musuh dari orang-orang kafir diluar wilayah Islam, karena akan berakibat kosongnya negeri Islam dari kekuasaan hukum Islam dan perundang-undangnya. Jika kaum muslimin tidak berangkat dari seluruhnya, maka ummat Islam yang berada dalam negeri tetap dapat melaksanakan hukum syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dibawah kepemimpinan ulil amri berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga tidak sampai terjadi kaum muslimin/muslimat yang tidak berangkat berperang itu, berhukum kepada thaghut.¹⁴⁴

2) Wajib 'Ain

Kekuasaan bukanlah suatu keharusan mutlak untuk membela dan memperjuangkan kalimat-kalimat Allah sehingga membuat kita diam tanpa semangat perjuangan. Apabila wilayah Islam diserang musuh maka seluruh kaum muslimin di wilayah tersebut

¹⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 206-207

¹⁴³ Abdul Qadir Hasan Baraja, *Op.Cit*, h. 82

tanpa kecuali berkewajiban melaksanakan *jihad fi Sabilillah* dan tidak seorang muslim pun yang berhak menolaknya menurut kemauannya sendiri kecuali bagi siapa yang dibenarkan oleh Allah dan Raul-Nya untuk uzur.¹⁴⁵

Berjihad memerangi mereka adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalah atau menang bukan lagi menjadi persoalan pokok atau masalah utama melainkan pelaksanaan kewajiban menurut kemampuan merupakan sikap yang harus diambil demi ridha Allah, menghindari penaklukan diri terhadap kekuasaan thaghut dan hukum-hukumnya. Maka izin kedua orang tua pun tidak menjadi persyaratan *jihad fi Sabilillah*, karena hukumnya wajib ‘ain.¹⁴⁶

3) Alasan-alasan Jihad

- a) Membela Diri
- b) Mencegah Fitnah Fid-Din
- c) Menundukkan Ahlul Kitab
- d) Membela Kaum Yang Tertindas
- e) Mengatasi Pengkhianatan Kaum Kafirin, Musyrikin dan Munafikin
- f) Mencegah Perpecahan Umat Islam¹⁴⁷

¹⁴⁴*Ibid*, h. 87

¹⁴⁵*Ibid*, h. 91

¹⁴⁶*Ibid*, h. 137

3. Kewajiban Penerapan Syari'at Islam di Indonesia

Kewajiban dan Penerapan Syariat Islam di Indonesia dalam pandangan Khilafatul Muslimin yaitu berupa kekuasaan. Kekuasaan pada dasarnya berasal dari umat yang berhimpun pada satu jamaah. Umat diberikan hak dan kebebasan untuk melimpahkan kekuasaan kepada seseorang untuk mengelola dengan tujuan untuk terjaminnya Syariat Islam. Abdul Qadir Hasan Baraja menyatakan kekuasaan diperoleh melalui pengakuan umat (prosesnya dapat melalui baiat). Kepemimpinan Khilafah harus diterima dengan ikhlas oleh umat. Konsekuensi dari diterima ajaran Islam dan kepemimpinan Islam adalah umat taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpinnya. Sehingga rakyat mempercayai pemimpin (Amir) untuk mengelola kekuasaan dalam rangka mengatur semua aktivitas kehidupan sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an. Kekuasaan duniawi dapat diperoleh jika umat di suatu tempat menyambutnya dan mendukungnya.¹⁴⁸

Konsep memperoleh dan mengelola kekuasaan yang merujuk pada kisah Rasulullah diadopsi oleh Khilafatul Muslimin. Rasulullah mendapat kekuasaan karena umatnya sendiri yang mengangkat beliau sebagai pemimpin masyarakat bukan sebagai pembawa risalah. Sedangkan pengelolanya bagaimana umat itu diarahkan untuk melaksanakan syariat Allah terutama terkait ketiga unsur ketaatan yakni

¹⁴⁷ Abdul Qadir Hasan Baraja, wawancara dengan penulis, Kantor Pusat Khilafatul Muslimin, Bandar Lampung, 20 September 2018

Allah, Rasul, dan Ulil Amri (pemimpin). Kekuasaan bukan tujuan tapi janji Allah SWT.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۚ ﴾



Artinya: “Dia telah mensyariatkan kamu tentang Dien, apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, Tegakkanlah Dien dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik Dien yang kamu seru mereka kepadanya. Allah hendak menarik kepada Dien itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (Dien)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” (Qs. As-Syura : 13)¹⁴⁹

Imam Syaukani menuturkan :

“Pada prakteknya sistem Khilafah Islamiyah dimaklumkan oleh seorang Khalifah ke seluruh dunia lebih kurang tiga tahun lamanya. Ternyata tidak ada yang menyambutnya, maka munculah Ust. Abdul Qadir Hasan Baraja yang membuat maklumat itu. Tahapan dakwah terus dilakukan setiap tanggal 1 Muharram dengan mengadakan sosialisasi yang mengundang seluruh ormas dan pihak lain yang ada di seluruh Lampung pada waktu”.¹⁵⁰

Proses diperolehnya kekuasaan dari tangan umat dalam pandangan Khilafatul Muslimin yang mencontoh tindakan Nabi, dibenarkan oleh Musthafa Jaelani yang menjabat sebagai Amir Wilayah Lampung Selatan. Dia mengatakan Khilafatul Muslimin ingin mencontoh tindakan Nabi dalam memperoleh dan mengelola kekuasaan. Misalkan ada suatu wilayah

¹⁴⁸Haryanto, “Makrullah dalam kemenangan Islam”, (al-khilafah edisi 63, 1438 H), h. 22

¹⁴⁹Moh. Rizky Godzali, *Op.cit*, h.118

di luar Indonesia yang siap dan mendukung sistem Khilafah Islamiyah maka disitulah terbentuk *Daulah* (Negara).¹⁵¹ Musthafa Jaelani lebih mendalam menerangkan bahwa :

“Suatu kaum akan diberikan kekuasaan jika dalam perjalanannya siapa mampu untuk mengemban tanggung jawab. Jika kekuasaan dipandang sebagai tujuan maka akan timbul suatu langkah perebutan dan peperangan. Saya memandang bahwa dakwah Rasulullah bukan berarti harus menguasai suatu tempat. Akan tetapi dia mengajak umat di suatu tempat untuk menerima Islam terlebih dahulu. Jika tidak ingin memeluk agama Islam maka dianjurkan untuk tunduk terhadap kepemimpinan Islam dengan cara membayar *jizyah* (pajak) demi terciptanya keselamatan dan kesejahteraan umum. Langkah terakhir jika tidak memeluk dan tidak tunduk terhadap kepemimpinan Islam maka dilakukan Jihad untuk perang, umat Islam seperti tertuang dalam Al-Qur'an diberi amanah untuk memimpin bumi. Maka diambillah amanah itu dan diajak orang-orang non-Muslim untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Allah dengan ikhlas tanpa paksaan. Dalam memimpin umat di bumi, umat Islam haruslah memberlakukan keadilan maka diajaklah umat lain untuk berada dalam satu kepemimpinan”.¹⁵²

Umat yang taat kepada pemimpin akan rela dan ikhlas untuk dipimpinnya (otomatis dikuasai) dalam rangka patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Dalam akidah Islam memandang pemimpin bukan sebagai penguasa, namun sebagai orang yang siap menjalankan syariah Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya. Selama itu tidak dilaksanakan maka umat berhak untuk menolak kepemimpinan. Pelaksanaan pengangkat pemimpin dalam konsep Khilafatul Muslimin dilaksanakan di setiap tingkatan pengelolaan kekuasaan umat. Tingkatan pembagian kekuasaan terdiri dari *Kemas'ulan –Ummul Quro-Wilayah-Daulah-Kekhilafahan*. Proses

¹⁵⁰Supra catatan kaki nomor 149

¹⁵¹Supra catatan kaki nomor 150

pemberian kekuasaan kepada pemimpin dalam lingkungan Khilafatul

Muslimin lebih rinci dipaparkan Imam Syaukani sebagai berikut :

“Dalam membentuk struktur kepemimpinan terkecil atau kelompok, berdasarkan permintaan dari umat atau yang membutuhkan minimal 5 orang untuk membentuk Kemas’ulan (Pemimpinnya disebut Mas’ul ummah atau penanggung jawab umat). Pada saat mencapai lebih dari 25 orang laki-laki maka harus dimekarkan. Jika di suatu tempat belum mencapai 25 orang, maka harus terus berdakwah ke beberapa tempat. Pada suatu titik dimana rakyat menyambut dengan langsung melakukan bai’at hingga jumlahnya 35 orang maka dapat dimekarkan langsung menjadi 2 Kemas’ulan. Pada satu tempat yang berdekatan telah terbentuk 5 Kemas’ulan maka berkumpul para *Mas’ul Ummah* beserta staffnya untuk memilih seorang *Amir Ummil Quro Ummil Quro* yang bertanggung jawab atas satu *Ummul Quro* (setingkat lebih tinggi Kemas’ulan). Jika didapati minimal 3 atau 5 *Ummul Quro* atau maksimal delapan maka dimekarkan membentuk wilayah. Sampai tahun 1431 H telah ada 15 wilayah di seluruh Indonesia, maka tanggal 1 Muharram 1432 H dibentuklah Struktur Daulah”.

Pembagian tingkatan kekuasaan dari yang terendah hingga yang paling tinggi bertujuan untuk memudahkan jangkauan daerah dakwah.

Musthafa Jaelani menjelaskan konsep perlahan kekuasaan yang sama dengan apa yang dipaparkan Imam Syaukani. Dia menganalogikan misalkan di suatu tempat terdapat sekelompok umat yang berjumlah 15 orang yang siap berbai’at kepada Allah, Rasul dan pemimpinnya maka jadilah di tempat tersebut terbentuk satu komunitas di bawah satu binaan yang berwujud *Kemas’ulan*. Ketika di kemudian hari komunitas itu mengalami peningkatan jumlah anggota maka bisa dimekarkan menjadi *Kemas’ulan* baru. Dalam rangka memudahkan kordinasi dakwah, 3 *Kemas’ulan* berada di bawah kepemimpinan satu *Ummul Quro*. Nantinya jika sudah terbentuk 6 *Ummul Quro*, bisa dibentuk satu wilayah.

Pembagian wilayah tidak berdasar pembagian wilayah/teritorial administrasi dan pemerintahan saat ini.

Evaluasi kepemimpinan di semua tingkatan kekuasaan dalam institusi Khilafatul Muslimin dilakukan setiap bulan Ramadhan. Tujuannya untuk merefleksi kepemimpinan selama satu tahun. Warga di tingkat *Kemas'ulan* mengevaluasi kepemimpinan *Mas'ul Ummah* dan diberi hak untuk menggantinya jika dinilai ada kesalahan dan pelanggaran saat memimpin. Sistem evaluasi dan pemilihan pemimpin umat yang dilakukan memang menyerupai sistem demokrasi yang ada yakni melihat suara mayoritas dari umat dalam menentukan pemimpin. Cara seperti itu ada landasan hadisnya yaitu pemimpin adalah seorang yang banyak disukai umatnya. Akan tetapi itupun harus ada batasannya, yang bermakna orang yang dipilih oleh mayoritas umat harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan sesuai tuntutan Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Pemilihan dan pemberhentian pemimpin dalam Khilafatul Muslimin dijelaskan oleh Imam Syaukani yang berpendapat :

“Kekuasaan dan kepemimpinan yang melekat pada seorang Amir di tiap-tiap tingkatan struktur berlaku selama dia sanggup menjalankan amanah umat. Dalam perjalanan nanti terdapat penyimpangan maka dapat di ganti untuk tujuan kemaslahatan umat. Saya beri contoh, misalkan untuk Amir *Ummul Quro*, seluruh *Mas'ul Ummah* berserta staffnya berkumpul untuk bermusyawarah. Jika satu *Kemas'ulan* terdapat lima orang pengurus, berarti 15 orang memilih pemimpin *Ummul Quro*. Siapa yang terbaik, dialah yang terpilih. Memilih pemimpin Ummul Quro tidak dilakukan oleh warganya, akan tetapi masing-masing *Mas'ul Ummah* yang sudah mendapatkan amanah dari umat.”¹⁵³

⁴⁰Moh. Rizky Godzali, *Op.cit*, h.120

4. Dasar-Dasar Pemerintahan Islam dan Ideologinya

Dasar-dasar Pemerintahan Islam dalam pandangan Khilafatul Muslimin seperti yang disampaikan Abdul Qadir Hasan Baraja, di antaranya yakni :

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Mendengar dan ta'at adalah wajib atas setiap Muslim baik dalam perkara yang ia sukai atau pun yang ia benci kecuali jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak ada (kewajiban) mendengar dan tidak pula taat.” (HR. At tirmidzi No. Hadis 1707).¹⁵⁴

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sayyar dari Asy Sya'bi dari Jarir bin Abdullah, ia berkata; saya membai'at Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, kemudian beliau membisikkan kepadaku: “Dalam perkara yang engkau mampu”. Serta menasehati setiap muslim.” (HR. Bukhari No. Hadis 6664)¹⁵⁵

¹⁵⁴Dikeluarkan oleh Imam At tirmidzi dalam kitab al jami'us shahih huwa sunan tirmidzi, al juz ar rabi', jilid 4, daarul kitab al'alamiyah, beirut-libanon, h.182

¹⁵⁵Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam bab baiat sebatas maksimal kemampuan , kitab baiah, Al-Alamiyah No. Hadis 4118 dan Maktabatu al Ma'arif Riyadh No. Hadis 4189.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Q.S. Al-A’raf : 96)¹⁵⁶

Tegaknya hukum dan perundang-undangan yang berlaku adalah syarat bagi tercapainya keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat menurut ajaran Islam. Jadi bukan stabilitas yang menjadi tujuan masyarakat Islam namun tegaknya ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam memberlakukan hukum dan syari’at Islam merupakan persyaratan bagi keadilan dan kesejahteraan umat yang menciptakan stabilitas pemerintahan Islam.¹⁵⁷

Dasar hukum kebebasan pemerintahan Islam sebagai berikut :

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي الْوُجُوهُ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٦٧﴾

¹⁵⁵ Abdul Qadir Hasan Baraja, *Op.Cit*, h. 107

¹⁵⁶ *Supra* catatan kaki nomor 155

Artinya: “Dan katakanlah : “Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; Maka Barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barang siapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir”. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yan paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”. (QS. Al-Kahfi : 29)¹⁵⁸

Kewajiban untuk bersatu dalam sistem Khilafah berdasarkan :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۖ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنُّ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ۛ﴾

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? “Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 30)¹⁵⁹

وَاعْتَصِمُوْۤا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْۤا ۚ وَاذْكُرُوْۤا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءَ ۭ فَآلَفَ بَیْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ ۖ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ ءَایٰتِهٖۤ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿ۛ﴾

¹⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 297.

¹⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 6.

Artinya:“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah¹⁶⁰ mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. Ali-Imran : 103)¹⁶¹

Keterangan :

Ibnu Katsir mengatakan dengan ayat ini Allah swt mewajibkan kaum muslimin untuk bersatu (berjama'ah) dan haram berpecah belah (berfirqoh-firqoh).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa: 59)

Keterangan :

Seorang Muslim wajib memiliki tiga ketaatan :

- Kepada Allah SWT dengan mengikuti Al-Qur'an.
- Kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti Sunnahnya.
- Kepada ulil amri minkum dengan berkhilafah (karena ulil amri minkum setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah para kholifah atau amirul mukminin).

¹⁵⁹Musthofa Jaelani, *Op.cit*, h.10

¹⁶⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*,(Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013), h.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾

Artinya:“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.”¹⁶² (Q.S. Al-Anfal : 73)¹⁶³

Keterangan :

Jika orang-orang kafir memiliki kepemimpinan secara universal (system kepausan) maka umat Islampun seharusnya memiliki kepemimpinan secara universal (system khilafah) agar tidak terjadi fitnah dan kerusakan di bumi.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا
مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٨﴾

Artinya:“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia ummat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan : “Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya .” (Q.S. Al-Hud : 118-119)¹⁶⁴

Keterangan ;

Manusia senantiasa berselisih dan berpecah belah kecuali orang-orang yang mendapat rahmat Allah SWT sajalah yang mau bersatu.

¹⁶¹Musthofa Jaelani, *Op.cit*, h.11

¹⁶²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*,(Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013), h. 199.

¹⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*,(Bekasi: Cipta Bagus Segara,2013), h. 235.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾



Artinya: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegaklah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi¹⁶⁵ petunjuk kepada (agama) –Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”. (Q.S. Asy-Syura : 13)¹⁶⁶

Keterangan :

Setiap muslim mendapatkan amanah untuk menegakkan Ad-Din dengan syarat wajib bersatu dan haram berpecah belah dalam menegakkannya.

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۚ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾

Artinya: “Katakanlah: “Dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan dan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami (Nya).” (Q.S. Al-An’am : 65)

¹⁶⁴Musthofa Jaelani, *Op.Cit*, h.12

¹⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h.

Keterangan :

Allah akan menimpakan azab dan merasakan keganasan satu golongan atas golongan lain akibat perpecahan umat.¹⁶⁷

Adapun dasar dalam sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Khilafatul Muslimin seperti dalam menundukkan Ahlul Kitab bahwa orang-orang yang beriman diharamkan Allah untuk mengangkat ahlul-kitab sebagai pemimpin mereka. Oleh karena itu, ahlul-kitab (Yahudi/Narsani) tidak berhak sedikitpun menjadi pemimpin kaum muslimin, karena tidak mungkin mereka akan memimpin berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dan mereka pasti menolak konsepsi Al-Qur'an sebagai sumber hukum positif yang berlaku dan dasar segala kebijaksanaan yang diputuskan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika sampai terjadi orang-orang kafir itu diakui sebagai pemimpin orang-orang beriman, maka hal tersebut merupakan alasan bagi kedatangan azab atas mereka.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ أُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu dengan mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (QS. An-Nisa’ : 144)¹⁶⁸

¹⁶⁶Musthofa Jaelani, *Op.Cit*, h.14

¹⁶⁷Abdul Qadir Hasan Baraja, *Op.cit*, h. 106

Komitmen seorang muslim terhadap pelaksanaan ajaran Islam tercermin dalam sikap taatnya terhadap seorang kholifah atau imam; dan betapa ruginya seorang muslim yang tidak taat kepada perintah kholifah dengan berbagai alasan yang tidak syar'i, karena ketidaktaatannya itu bernilai makshiat, meskipun ia tidak mencuri atau berzina, tetapi hanya duduk-duduk bersantai dalam rumahnya sendiri.

Rasulullah SAW bersabda :

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِينِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: “Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits sebelumnya; dari Abu Hurairah; Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Barangsiapa mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, dan barangsiapa durhaka kepadaku maka ia telah durhaka kepada Allah, dan barangsiapa mentaati amirku maka ia telah mentaatiku, dan barangsiapa durhaka terhadap amirku maka ia telah durhaka kepadaku.” (HR. Muslim No. Hadis 1835).¹⁶⁹

Alangkah meruginya, seorang yang mengaku beriman padahal telah berusaha keras meninggalkan perjudian, perzinahan, pencurian, penipuan dan larangan-larangan Allah lainnya, tiba-tiba disuatu saat ia dengan sengaja tidak bersedia mendengar dan ta'at pada ulil amrinya: yang berarti ia telah berbuat makshiat karena menentang perintah Allah dan Rasul-Nya untuk taat pada ulil amri.¹⁷⁰

¹⁶⁹Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim, Juz 3, Maktabat Rihalan Indonesia, h. 1466

¹⁶⁹Abdul Qadir Hasan Baraja, *Memilih jama'ah yang benar*, (Bangil Jatim: Ud. Abda'u Jaya Bangil , 1437 H/ 2016), h. 53

Setelah Nabi wafat kembalikan ke khalifah. Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai Ketua Umum/Khalifah Khilafatul Muslimin sangat mendukung penuh jika Islam dijadikan Ideologi Negara. Selain sistem Khilafah tidak ada sistem yang bisa dijadikan sistem pemerintahan secara global karena sistem Khilafah adalah sistem yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Abdul Qadir Hasan Baraja pun menuturkan :

“Tidak ada yang dapat mengatur segala keseharian dan kehidupan umatnya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis selain Islam. Kurang sepakatnya dengan sistem demokrasi karena pentingnya menegakkan sistem yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu sistem Khilafah. Islam itu indah. Tidak memaksakan untuk memeluk agama Islam bagi non-Muslim tetapi tetap mengikuti segala aturan di bawah kepemimpinan seorang Khalifah. Islam yang dimaksud adalah membebaskan bagi yang non-Muslim dalam hal memeluk agama masing-masing”.¹⁷¹

Perlu digaris bawahi ajaran Islam yang dimaksud oleh Khilafatul Muslimin adalah ajaran yang rahmatan lil'alamin dengan akhlakul karimah, jadi mereka tidak ingin memerangi siapapun, bahkan kepada non muslim apalagi sesama kaum muslimin.

5. Berjamaah menurut Khilafatul Muslimin

Jama'ah adalah wadah bagi kehidupan bersama seluruh kaum Muslimin dan Muslimat di muka bumi ini untuk melaksanakan ajaran Islam dibawah seorang imam/khalifah/amirul mukminin sebagai

¹⁷⁰ Abdul Qadir Hasan Baraja, wawancara dengan penulis, Kantor Pusat Khilafatul Muslimin, Bandar Lampung, 20 September 2018

pemimpin, dengan sistem kekhalifahan sebagai sistem kekuasaan mereka. Tanpa jama'ah maka mustahil ummat Islam dapat melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan kecuali hanya dalam bentuk-bentuk ritual secara pribadi sebagai bagian-bagian kecil dari keseluruhan prioritas Al-Qur'an. Maka untuk melaksanakan Islam secara kaffah sesuai perintah, ummat Islam diwajibkan berjama'ah dan mentaati ulil amri.

Firman Allah :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa: 59)¹⁷²

Dalam ayat tersebut Allah telah mewajibkan setiap orang yang beriman (laki-laki maupun perempuan) agar mentaati-Nya dan juga mentaati Rasulullah serta ulil amri mereka; dan ini tidak dapat dibenarkan seorang mukminin merasa cukup dengan hanya taat pada Allah dan Rasul-Nya saja dalam hidupnya, sebab wajib punya ulil amri yang akan memimpin kaum muslimin sedunia untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya.

Seorang mukmin tidak akan dapat membela diri dihadapan Allah kelak dengan berdebat; bahwa ia setelah memahami ajaran Islam, lalu

¹⁷¹Supra catatan kaki nomor 118

merasa tidak lagi memerlukan keberadaan ulil amri, lalu mengamalkan Islam menurut kehendaknya sendiri tanpa diatur oleh ulil amri, karena berarti ia menolak perintah Allah dan Rasul-Nya. Ulil Amri dimaksud berkewajiban memimpin ummat berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya dan tidak boleh menentukan kebijaksanaan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu mereka wajib menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di bawah kekuasaan mereka itulah ummat Islam wajib bersatu sebagai satu jama'ah dan tidak boleh berpecah belah. Islam tidak perlu membenarkan adanya dua atau lebih jama'ah yang tidak dapat disatukan dibawah satu kepemimpinan Rasulullah sampai zama Al-Khulafaur Rasyidun, ummat Islam tidak pernah dipimpin oleh dua kepemimpinan yang tiada bersatu kecuali salah satunya diperangi. (Pelajari sejarah peperangan antara Khalifah Ali melawan Muawwiyah).¹⁷³

6. Hubungan Internasional menurut Khilafatul Muslimin

Pemerintahan Islam dalam batas wilayah yang dikuasainya merupakan pusat pemerintahan dimana imam/khalifah beserta dewan imamahnya bermusyawarah untuk menentukan segala kebijakan yang menyangkut kepentingan dalam negeri maupun luar negeri dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan darurat perang.

¹⁷²*Ibid.*, h. 12

a. Masa Damai

Dalam keadaan damai ulil amri berkewajiban mengadakan hubungan baik dengan seluruh negeri di muka bumi ini demi dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia bagi segenap ummat manusia secara bijaksana disertai *al-akhlaq al-karimah* dan memberikan contoh teladan yang baik. Sementara dalam hubungan baik antara pemerintahan Islam dan pemerintahan non-Islam memungkinkan terealisasinya hubungan-hubungan di berbagai bidang menyangkut kemaslahatan dunia seperti perdagangan, perekonomian¹⁷⁴ mian, perindustrian dan lain-lain dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Pada prinsipnya segala hubungan baik dengan negeri-negeri ini adalah demi kelancaran dakwah Islamiyah *bil hikmah wal mau'izhatil hasanah* disertai kepandaian berargumentasi yang mumpuni tanpa kekerasan dan paksaan terhadap siapapun yang terang-terangan menolak dakwah dan menentanginya dengan kata-kata ataupun menghinanya, sebab kekuatan senjata dan kekerasan hanyalah untuk membela diri dari pemaksaan musuh-musuh Islam yang hendak menundukkan kaum muslimin kepada kehendak mereka yang meninggalkan hukum atau syariat Islam dan untuk membela diri dalam mempertahankan kemerdekaan ummat Islam menyampaikan dakwah.

¹⁷³*Ibid*, h. 116

Sesungguhnya setiap ummat berhak penuh untuk merdeka melaksanakan segala keyakinan agamanya dan tidak seorang pun manusia yang boleh melarangnya, sebab tidak ada manusia yang senang dijajah ataupun merestui penjajahan sesamanya. Maka tidak boleh ada di muka bumi ini suatu golongan yang merasa berhak memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada sesama, sebab demikian itulah arti penjajahan dan penindasan

Adapun seluruh manusia jika dipaksa tunduk kepada ketentuan dan hukum-hukum Allah maka hal tersebut sebenarnya adalah rasional, karena Allah adalah Pencipta sekaligus makhluk yang Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Bijaksana tanpa tandingan. Karenanya¹⁷⁵ pembelaan terhadap kekuasaan demi tegaknya hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban seluruh manusia sedangkan pembelaan terhadap kekuasaan selain itu adalah kesesatan dan menyesatkan ummat manusia.

Selama kaum muslimin tetap mendapat kebebasan menyampaikan dakwah Islamiyah maka selama itu pula hubungan baik dan damai antara pemerintahan Islam dan pemerintahan non-Islam lainnya tidak akan terputuskan, akan tetapi jika kebebasan berdakwah dicegah dengan kekuatan senjata dan kekerasan, maka hubungan damai telah terabaikan dan kemungkinan perang adalah penyelesaiannya. Dalam masa damai pemerintahan Islam berkewajiban

¹⁷⁴*Ibid*, h.117

menyampaikan dakwah tanpa kekerasan dan paksaan sedikitpun, hal mana telah dinyatakan oleh Allah dalam ayat berikut:¹⁷⁶

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

Artinya: “Dan janganlah membantah ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik selain kepada mereka yang berbuat zhalim dan katakanlah, ‘Kami telah beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepada kami dan pada apa yang telah diturunkan pada kalian sedang Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu dan kami berserah diri kepada-Nya’”. (Q.S. Al-Ankabut: 46)¹⁷⁷

﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾

Artinya: “Dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka jika terdapat permusuhan antara kamu dengannya, seolah-olah dia adalah teman setia”. (Q.S. Fussilat: 34)¹⁷⁸

Jadi jelas tidak terdapat sedikitpun jalan kekerasan dalam Islam bagi kaum muslimin terhadap siapapun atau di negeri manapun kecuali jika pemerintah Islam menyatakan perang terhadapnya karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁷⁹

¹⁷⁵ Ibid, h.118

¹⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 402.

¹⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 48.

¹⁷⁸ Musthofa Jaelani, *Op. Cit*, h.119

b. Masa Perang

Sesungguhnya perang itu adalah sesuatu yang tiada diingini dan senantiasa dihindari oleh pemerintah Islam sebab ia mendatangkan kesusahan dan kerugian harta dan jiwa pada akhirnya, dimana naluri manusia tidaklah mengkehendaki kehancuran dan kesengsaraan. Oleh karena itu kaum muslimin melalui pemerintahan Islam hanya menyatakan perang terhadap negeri-negeri lain jika mereka yakin mendapat keuntungan yang lebih besar dari pengorbanan yang mereka hadapi dan dalam rangka melaksanakan kewajiban atas dasar perintah Allah dan Rasul-Nya:¹⁸⁰

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kalian berperang padahal perang itu tidak kalian sukai. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal ia baik bagi kalian dan barangkali kalian menyukai sesuatu padahal ia tidak baik bagi kalian. Allah mengetahuinya sedang kalian tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 216)¹⁸¹

Maka banyak sekali dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits yang kita dapati mengenai perintah perang tersebut, dan terhadap siapa kaum muslimin boleh menyatakan perang serta persyaratan-persyaratan apa yang wajib dipersiapkan. Keseluruhan permasalahannya telah jelas, namun yang penting kita tekankan disini bahwa tidak boleh

¹⁷⁹ Ibid

¹⁸⁰ Supra catatan kaki nomor 179

melancarkan peperangan terhadap siapapun kecuali hanya atas perintah Allah dan Rasul-Nya, sebab tak seorangpun yang boleh/berhak menghilangkan nyawa orang lain selain Allah. ¹⁸²



¹⁸¹*Ibid*, h.120

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Kritis terhadap Konsep Pemerintahan dalam ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin

Pokok pandangan *takfiri* daripada Organisasi Khilafatul Muslimin ini tidak cocok menurut Islam, karena didalam Islam tidak boleh begitu saja meng*kafir*kan orang lain yang sesama Muslim. Jika kata *kafir* ditujukan untuk non-Muslim, tentu diperbolehkan.

Konsep yang diterapkan oleh Organisasi Khilafatul Muslimin banyak sekali kelemahan-kelemahannya antara lain:

1. Dalam berita on-line, Abdul Qadir Hasan Baraja menjelaskan bahwa tujuan dari organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung untuk mempersatukan umat Islam dan kemerdekaan yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama. “Kita tidak ada sedikit pun berpikir untuk membenci dan menyakiti penganut agama lain, bahkan tindakan kekerasan tidak dibenarkan oleh agama Islam, termasuk oleh Khilafatul Muslimin. Saya menganalogikan menyembelih hewan qurban jika menggunakan alat yang tumpul, itu saja tidak diperbolehkan, membunuh semut aja enggak boleh, apa lagi menyakiti sesama manusia.”¹⁸³

183

“Lampost.co”

(On-line),

tersedia

di:

<https://www.google.co.id/amp/www.lampost.co/amp/khilafatul-muslimin-sebut-tidak-pernah-ajarkan-kekerasan-dan-terorisme> (8 Mei 2019).

Penjelasan dari hasil wawancara langsung oleh pihak lampost.co ke Abdul Qadir Hasan Baraja pemimpin dari organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung di Kantor pusat khilafatul muslimin, di jalan WR Supratman, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Kamis (28/9/2017) siang. Penjelasan seperti itu adalah penjelasan dengan kalimat penyusunan kata demi kata yang sangat indah untuk didengar dan dibaca namun tidak dalam praktiknya. Penulis kutip kembali apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai pemimpin dari organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung kepada tim jurnalis dari lampost.co beberapa tahun lalu bahwa “Saya menganalogikan menyembelih hewan qurban jika menggunakan alat yang tumpul, itu saja tidak diperbolehkan, membunuh semut aja enggak boleh, apa lagi menyakiti sesama manusia.”

Dari kutipan berita tersebut. Terdapat kalimat “. . . apa lagi menyakiti sesama manusia” berarti tujuan dari organisasi Khilafatul Muslimin dalam berbicara dan bertindak tidaklah untuk menyakiti sesama manusia. Baik itu tercermin dari perkataan dan perbuatan. Lalu bagaimana dengan kalimat-kalimat yang didalam kata perkataanya terdapat kata *kafir*?. Dimana kata *kafir* itu ditujukan untuk selain anggota dari organisasi khilafatul muslimin. Sadar atau tidak, langsung dan tidak langsung. Diluar dari keanggotaan organisasi Khilafatul Muslimin tersebut. Tidak sepenuhnya *Kafir*, karena kata *kafir* hanya dikhususkan untuk yang beragama non-Muslim saja. Terlalu sempit

kiranya jika yang dijadikan tolak ukur hanya sebatas wilayah Bandar Lampung. Faktanya, khusus wilayah Indonesia saja. Sekitar 80% beragama Islam. Dimana umat Muslim menjadi mayoritas di wilayah Indonesia sendiri. Secara tidak langsung khusus diluar keanggotaan organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung terhitung secara luas. Dilihat dari keseluruhan masyarakat yang ada di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam pun tidak menjadi bagian dari keanggotaan organisasi Khilafatul Muslimin disebut *Kafir*.

Pernyataan seperti itu dengan meng*kafir*kan yang ditujukan juga untuk selain dari keanggotaan organisasi khilafatul muslimin dan ditujukan pula untuk yang beragama Islam adalah bentuk kata yang semestinya tidak harus diucapkan dan ditujukan untuk sesama Muslim. Apakah dalam Islam dianjurkan meng*kafir*kan sesama Muslim? Tentu tidak. Islam tidak pernah mengajarkan dan menganjurkan penyampaian kata *Kafir* itu ditujukan pula untuk sesama Muslim karena kata *Kafir* diperbolehkan untuk diucapkan dan ditujukan bagi yang belum memeluk Islam sebagai agama satu-satunya yang diyakini oleh salah satu orang atau individu maupun kelompok tertentu.

Pandangan ataupun sikap eksklusif bahwa orang-orang yang tidak mengikuti ajaran dari Organisasi Khilafatul Muslimin adalah termasuk orang kafir (*takfiri*). Pandangan dan sikap seperti itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam, mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia yang tidak lain wilayah domisili dari Organisasi Khilafatul

Muslimin adalah 80% beragama Islam artinya penulis yakin diluar keanggotaan organisasi khilafatul muslimin dalam lingkup Bandar Lampung maupun dalam lingkup secara luas yakni ke Indonesiaan. Mayoritas yang tidak menjadi bagian dari keanggotaan organisasi Khilafatul Muslimin pun beragama Islam.

2. Ajaran-ajaran organisasi Khilafatul Muslimin

a. Bai'at

Bai'at-bai'at yang ada pada masa sekarang ini telah merubah pengertian *al wala' wal bara'*. Sehingga *al wala'* (loyalitas atau kecintaan) diberikan kepada siapa saja yang bergabung dalam bai'at terhadap jama'ah, dan *al bara'* (kebencian) dilancarkan kepada orang yang tidak berbai'at kepada pemimpin jama'ah dan kepada disiplin ajaran jama'ah. Padahal bisa jadi, orang yang berbai'at kepadanya adalah ahli *bid'ah* yang sesat atau orang bodoh.

Sangat disayangkan, kebanyakan orang tertipu dalam bai'at ini adalah para pemuda/i yang memiliki semangat beragama, mereka suka melaksanakan amal kebaikan dan menegakkan syari'at Islam ditengah hamba-hamba Allah. Lalu sebagian orang yang memiliki pemikiran menyimpang memompakan semangat kepada para pemuda ini, sehingga diantaranya melaksanakan semua intruksi yang ditujukan kepada mereka, tunduk kepada yang memberi instruksi itu, bahkan membela mati-matian.

b. Jihad

Jihad dapat berarti berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi Muslim yang baik. Tidak hanya dikhususkan bagi yang Muslim saja, akan tetapi non-Muslim juga diperbolehkan. Al-Qur'an telah mengajarkan dan menganjurkan umat Islam untuk berbuat baik, termasuk pada orang tua. Tetapi, kalau ada yang mengajarkan berbuat tidak baik maka itu adalah jihad *fisabil syaiton*. Namun, jihad yang dilakukan untuk kebaikan namanya jihad *fisabilillah*.

Ajaran dari organisasi Khilafatul Muslimin salah satunya dalam lingkup jihad adalah tidak dianjurkan oleh seorang khalifah mereka untuk patuh dan taat kepada suami dan orang tua karena patuh dan taat itu hanya dianjurkan untuk seorang pemimpin saja. Kiranya, dapat membedakan dari ajaran organisasi khilafatul muslimin itu jihad yang diterapkan itu. Apakah pantas diikuti ajaran seperti itu atau tidak.

c. Kewajiban penerapan syari'at Islam

Kewajiban penerapan syari'at Islam yang diajarkan oleh organisasi Khilafatul Muslimin adalah kewajiban tegaknya sistem pemerintahan Islam atau Negara Islam dalam suatu wilayah tertentu. Dasar utama pemerintahan Islam yang diajarkan oleh organisasi Khilafatul Muslimin adalah Q.S. An-Nisa ayat 59. Ayat tersebut menjelaskan perihal kepemimpinan saja. Mengutip

pandangan Gus Dur pun, ia meyakinkan bahwa tidak ada pendapat baku dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang mewajibkan penegakan Sistem Pemerintahan Islam yang berbentuk Negara Islam. Jawaban itu didasari dari ketiadaannya pendapat baku dalam dunia Islam mengenai sebuah negara.

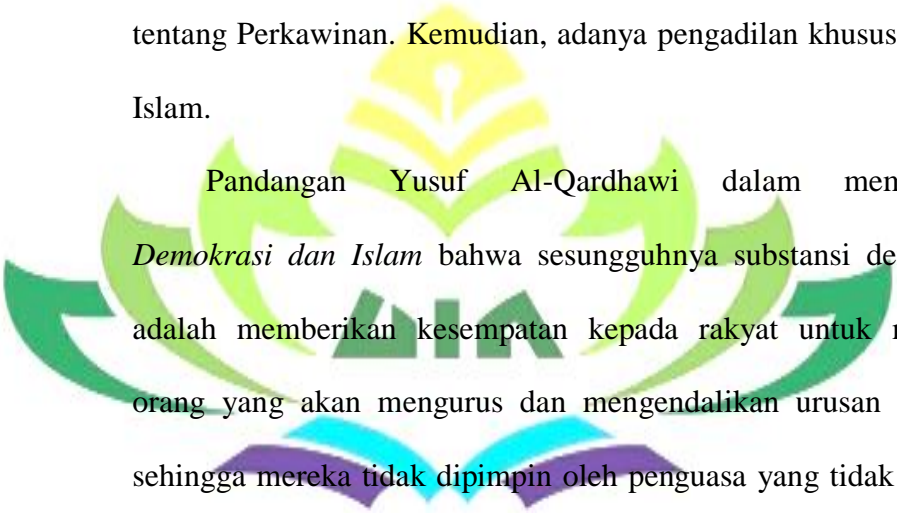
Didefinisikan bahwa ajaran yang diterapkan oleh organisasi Khilafatul Muslimin tidak berpedoman dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika masih memaksa menerapkan sistem pemerintahan Islam. Sementara, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada pendapat baku tentang wajib tegaknya Negara Islam dalam suatu wilayah tertentu.

d. Dasar-dasar pemerintahan Islam dan Ideologinya

Dasar yang utama dari ajaran organisasi khilafatul muslimin yakni Q.S An-Nisaa' ayat 59 itupun hanya menjelaskan tentang kepemimpinan dalam Islam saja. Faktanya, memang benar tidak ada bentuk baku dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang wajib tegaknya Negara Islam di suatu wilayah tertentu.

Pemikiran dari ajaran organisasi Khilafatul Muslimin sendiri mewajibkan wajib tegaknya sistem pemerintahan Islam atau Negara Islam. Terkhusus, perwujudan dari ajaran organisasi Khilafatul Muslimin yakni mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajib tegaknya Negara Islam memunculkan

pemikiran bahwa Sistem Demokrasi adalah sistem yang tidak dianjurkan dalam Islam. Padahal, Sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia adalah berbeda dengan sistem demokrasi Barat. Beberapa hukum Islam pun, telah diterapkan dan dipraktekkan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Misalnya; Undang-undang tentang Perbankan Syari'ah, Undang-undang tentang Perkawinan. Kemudian, adanya pengadilan khusus Agama Islam.



Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam memandang *Demokrasi dan Islam* bahwa sesungguhnya substansi demokrasi adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang yang akan mengurus dan mengendalikan urusan mereka, sehingga mereka tidak dipimpin oleh penguasa yang tidak mereka sukai, atau diatur oleh sistem yang mereka benci. Selain itu, mereka juga harus mempunyai hak menilai dan mengkritik jika penguasa melakukan kesalahan, juga hak opsi jika penguasa melakukan penyimpangan. Rakyat tidak boleh digiring pada aliran atau sistem ekonomi, sosial, budaya, atau politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka setuju, dan itulah substansi demokrasi. Kemudian lebih lanjut, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa realitas menunjukkan, bahwa orang yang

memperhatikan secara seksama substansi demokrasi, maka dia akan mendapatkan bahwa ia termasuk dari konsep Islam.¹⁸⁴

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, substansi demokrasi sebagai berikut:

- 1) Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh dipaksakan untuk memilih sesuatu yang mereka sendiri tidak sukai. Demikian juga halnya dalam Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum dibelakangnya.
- 2) Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa tiran juga sejalan dalam Islam. Bahkan, amar ma'ruf dan nahi munkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.¹⁸⁵

Inilah substansi demokrasi sesungguhnya dibalik sistem-sistem praktis demokrasi seperti pemilu, dewan legislatif, penetapan pilihan mayoritas, multi partai, hak-hak minoritas dan oposisi, kebebasan pers, independensi yudikatif dst. Substansi seperti yang seharusnya diterapkan. Jauh sebelum demokrasi muncul, Islam sudah mengemukakan kerangka ini. Tujuannya agar

¹⁸⁴ “Dr Yusuf Al-Qaradhawi dan Demokrasi” (On-line), tersedia di: <https://almanhaj.or.id> (8 Mei 2019).

¹⁸⁵ Ripyal Pahri, “Demokrasi; Pemilihan Umum dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi”. (Skripsi Program Sarjana Strata 1 Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

terbukanya lapangan ijtihad bagi umat Islam untuk terus menyelaraskan kemaslahatan agama dan dunia dalam kehidupan realitas yang terus bergerak sesuai tuntutan zaman. Umat Islampun untuk dituntut berfikir mencari model terbaik karena dalam Islam pun tidak ada larangan mengambil hikmah dari golongan lain selama sejalan dengan Islam itu sendiri.

Ajaran organisasi Khilafatul Muslimin dengan tidak menyepakati sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah ajaran yang penting kiranya disejalankan dengan para pemikir Islam yang telah lebih dahulu mengkaji perihal kenegaraan Islam. Tentunya, cerdas dan bijak memilih pemikiran para pemikir Islam yang sudah menyalurkan pemikirannya perihal kenegaraan dalam Islam dengan situasi dan kondisi saat ini. Tidak bertahan dengan pemikiran klasik, agar pemikiran perihal kenegaraannya lebih mencakup secara luas dan dapat disesuaikan dengan zaman modern.

e. Berjamaah

Berjamaah dibolehkan jika dalam artian berkumpul untuk melakukan kebaikan dan memberi petunjuk. Siapa pun dapat berkumpul dengan dua, tiga, empat atau sepuluh orang untuk saling menasihati, menjalin persaudaraan, membaca bersama, memberikan nasihat, pergi bersama-sama mengunjungi seseorang, berdakwah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi yang ada di

antara satu dengan yang lainnya adalah saling membantu, bukan terjat dengan ikatan taat. Sehingga muncul tata tertib kerja, dan bukan *tanzhim*. Berjama'ah yang diterapkan oleh organisasi khiafatul muslimin adalah terjat dengan ikatan taat kepada seorang khalifah. Faktanya, khalifah mereka sendiri tidak taat pada pemimpin negara diwilayah yang menjadi tempat tinggalnya. Bentuk ketidak taatnya adalah dengan membuat kepemimpinan baru dibawah kepemimpinannya yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja.

Tanzhim dalam arti membentuk seorang pemimpin yang ditaati bagi suatu golongan, sedangkan orang-orang yang ada dibawahnya mendapat segala intruksi, seperti halnya terjadi pada seorang imam. Maka ini jelas tidak boleh.

f. Hubungan Internasional

Pemerintahan Islam dalam batas wilayah yang dikuasainya merupakan pusat pemerintahan dimana imam/khalifah beserta dewan imamahnya bermusyawarah untuk menentukan segala kebijakan yang menyangkut kepentingan dalam negeri maupun luar negeri dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan darurat perang.

Adapun seluruh manusia jika dipaksa tunduk kepada ketentuan dan hukum-hukum Allah maka hal tersebut sebenarnya adalah rasional, karena Allah adalah Pencipta sekalian makhluk yang Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Bijaksana tanpa

tandingan. Karenanya¹⁸⁶ pembelaan terhadap kekuasaan demi tegaknya hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban seluruh manusia sedangkan pembelaan terhadap kekuasaan selain itu adalah kesesatan dan menyesatkan ummat manusia.

Hubungan Internasional dalam ajaran organisasi Khilafatul Muslimin yakni hubungan antara seorang khalifah dengan jajarannya bermusyawarah untuk menentukan segala kebijakan yang menyangkut kepentingan dalam negeri maupun luar negeri dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan darurat perang.

Cakupan wilayah konsep pemerintahan dalam ajaran organisasi Khilafatul Muslimin, hanya sebatas Negara Kesatuan Republik Indonesia saja. Hubungan internasional yang seyogyanya mencakup kepentingan dalam negeri maupun luar negeri. Belum dapat terwujud karena batas wilayah dalam konsep pemerintahan organisasi Khilafatul Muslimin, masih sebatas wilayah dalam negeri yakni Indonesia saja.

¹⁸⁵ *Supra* catatan kaki nomor 174

B. Relevansi ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin dengan situasi politik atau pemerintahan di Indonesia

Seiring dengan tajamnya pemikiran para pengkaji ilmu dan keinginan masyarakat awam yang ingin menambah wawasan dalam menanggapi permasalahan kenegaraan seperti pemecahan masalah atau solusi yang tepat dalam menjawab segala kebingungan tentang sebenarnya wajib atau tidaknya negara Islam itu berdiri tegak dalam suatu wilayah tertentu.

Sistem Pemerintahan Islam yang diinginkan organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung untuk diterapkan di Indonesia. Tidak cocok jika diterapkan di Indonesia. Ajaran organisasi Khilafatul Muslimin dalam menginginkan pergantian sistem yang ada, dari sistem Demokrasi menjadi sistem pemerintahan Islam berbentuk sistem Khilafah. Bukanlah solusi yang tepat.

Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Ciri dan Karakteristik Madrasah Moderat. Dimana lebih mengutamakan tujuan (*Ghoyah*) dibandingkan pendekatan diri kepada Allah (*Wasilah*). Bukan berarti mengedesampingkan pendekatan diri kepada Allah. Perlu dipahami bahwa dimaksud dengan lebih mengutamakan tujuan adalah bahwa dalam Islam sendiri pun diajarkan untuk mengutamakan kemaslahatan umat. Disini tidak diartikan sempit hanya sebatas atau ditujukan untuk Muslim saja. Akan tetapi non-Muslim pun dapat perlindungan dalam ajaran agama Islam. Islam menjadi agama yang *rahmatan lil'alamin*. Tercantum dalam salah satu pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Menggabungkan teks dan Hukum Syari'at mengatur *Siyasah Syar'iyah*. *Siyasah Syar'iyah* merupakan

otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dalam agama, meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya¹⁸⁷. Hal itu adalah dalam perkara-perkara yang tidak ada nash-nya (dalil syar'i secara khusus dan tegas dalam syariat Islam). Berlaku kiranya pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam mengatur urusan kenegaraan. Indonesia sendiri sedikit banyak telah sesuai dengan semangat yang Islami, walaupun secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, namun secara substansi telah tercermin dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Karena inti daripada *siyasah syar'iyah* adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pemerintahan Indonesia dijalankan secara demokratis yang memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam roda pemerintahan dan ikut serta dalam menentukan masa depan bangsa (pemimpin).

Dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang madrasah moderat, jika dikaitkan dengan permasalahan kenegaraan dan dihubungkan dengan konsep pemerintahan dalam ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung adalah bahwa Islam sendiri mengajarkan dan menganjurkan untuk mengutamakan kemaslahatan umat. Tidak hanya umat Muslim, tetapi non-Muslim juga. Sesuai dengan apa yang sudah diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Sistem Demokrasi dipilih karena melihat kemajemukan dari masyarakat di Indonesia. Selain itu, sedikit melihat latar belakang Indonesia. Dimana sejarah pergantian 7 kata dalam *Teori Receptie Exit*, penghapusan 7 kata setelah kata

¹⁸⁷Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, *Op.Cit*, h. 20

ketuhanan pada alinea keempat tercantum dalam *Piagam Jakarta*. 7 kata itu sendiri yaitu “*Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” menjadi “*Ketuhanan yang Maha Esa*”. Bukan tanpa alasan penghapusan 7 kata itu terjadi, tentu karena tidak ingin adanya konflik dan perpecahan. Mengingat, keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan yang ada di Indonesia. Keunikan-keunikan dalam keberagaman seperti itu yang seyogyanya dijaga bersama.

Tidak harus saling menampilkan keegoisan baik antar suku, agama, ras dan antargolongan. Perihal urusan kenegaraan tidak mesti saling mengunggulkan suku apa yang paling baik, atau agama apa yang paling indah, atau ras apa yang paling bagus, ataupun golongan mana yang paling kuat. Cukup wujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara dan bersikap sesuai dengan apa yang diajarkan dan dianjurkan ajaran agama masing-masing karena pasti setiap agama mengajarkan dan menganjurkan kepada seruan kebaikan, tanpa harus merasa paling benar dan memilih tidak bersikap toleran terhadap perbedaan yang ada. Selain itu, tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang menyerukan kewajiban menegakkan Negara Islam secara legal formal. Ayat-ayat politik dalam Al-Qur'an hanyalah menyeru kepada penegakkan prinsip *'adalah* (keadilan), *ukhuwah* (persaudaraan), *musawah* (persamaan), dan *ta'awun* (kerjasama). Praktekkan prinsip etika moral yang diajarkan dan dianjurkan dalam setiap agama, bukan legal formal. Demikian pula dalam teks hadits Nabi dan Piagam Madinah.

Ciri dan karakteristik madrasah moderat yang menjadi pandangan dari Yusuf Al-Qardhawi itu, seharusnya dipraktekkan terutama dalam urusan

bernegara. Mengingat kembali, penghapusan 7 kata yang berdasarkan syari'at Islam menimbulkan permasalahan dimasa lampau. Jika konsep pemerintahan ajaran organisasi Khilafatul Muslimin diterapkan di Indonesia dengan memaksa pergantian sistem yang ada. Dari sistem demokrasi menjadi sistem pemerintahan Islam. Ya, memaksa untuk kembali mengulang munculnya permasalahan yang sudah cukup meredam itu. Semestinya, penghapusan 7 kata itu sudah tepat dan dapat menyatukan kembali antar suku, agama, ras, dan antargolongan dimasa lampau hingga sekarang. Kedepannya akan terjadi konflik bahkan perpecahan, jika tetap memaksa pergantian sistem yang ada.

Lebih baiknya, bahu-membahu menjaga keutuhan masyarakat antar suku, agama, ras dan antargolongan tanpa ada niatan untuk memaksa melakukan perubahan sistem yang ada dengan konsep pemerintahan dalam ajaran organisasi Khilafatul Muslimin.

Konsep ajaran Organisasi Khilafatul Muslimin ini belum matang ataupun belum lengkap karena organisasi khilafatul muslimin tidak memuat tatacara pemilihan khalifah secara pasti dan terstruktur. Bagaimana struktur pemerintahan? Seharusnya ada badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam Islam lembaga yang mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat disebut dengan *Ahl-al-hall wa al-'aqd*, sedangkan di Indonesia disebut dewan perwakilan rakyat atau dikenal dengan nama lembaga legislatif. Lembaga ini bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan. Karena menetapkan syari'at sebenarnya hanyalah wewenang Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami

sumber-sumber syar'iat dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Selain itu, undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Relevansinya ajaran organisasi Khilafatul Muslimin diterapkan di Indonesia, tidak bisa. Karena kenyataanya, negara-negara sudah terpecah-pecah dalam negara bangsa (*nation state*). Tidak mudah untuk disatukan kembali. Oleh karenanya, untuk menerapkan pemerintahan Organisasi Khilafatul Muslimin di Dunia. Sifatnya Internasional itu kecil kemungkinan untuk bisa diterapkan, bahkan cenderung mustahil. Karena belum ada kepastian siapa yang akan mewakili atau penerus dari *khalifah* Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung.

Lalu sistem keuangan dari Organisasi Khilafatul Muslimin didapat darimana? Bagaimana cara-caranya? Karenanya konsep pemerintahan Organisasi Khilafatul Muslimin tidak relevan. Jika diterapkan di suatu wilayah tertentu. Khusus Indonesia yang memang negara bangsa (*nation state*).

Sistem pemerintahan organisasi Khilafatul Muslimin tidak relevan, jika diterapkan di Indonesia. Keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan yang ada di Indonesia, warganya tidak homogen tetapi heterogen terdiri dari berbagai suku-suku, agama-agama, ras-ras, dan antargolongan-golongan.

BAB V PENUTUP

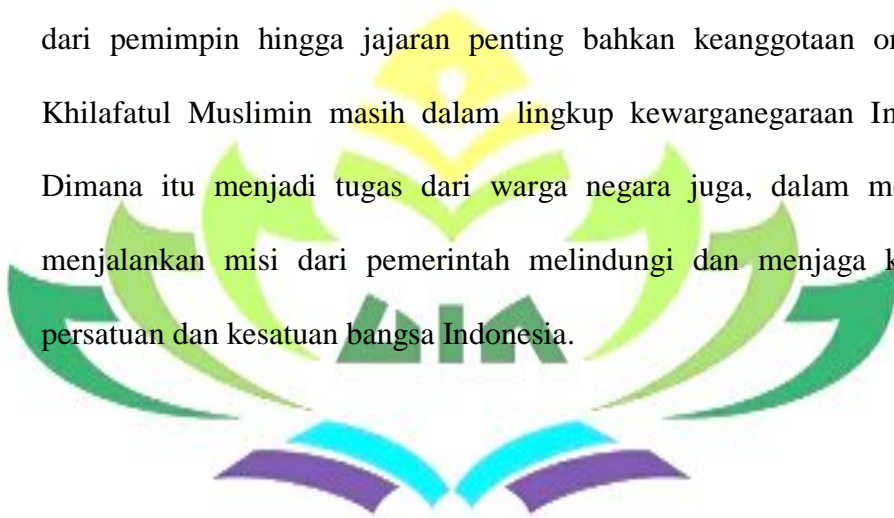
A. Kesimpulan

1. Pokok pandangan *takfiri* daripada Organisasi Khilafatul Muslimin ini tidak cocok menurut Islam, karena didalam Islam tidak boleh begitu saja meng*kafir*kan orang lain yang sesama Muslim. Jika kata *kafir* ditujukan untuk non-Muslim, tentu diperbolehkan.
2. Ajaran organisasi Khilafatul Muslimin ini adalah tidak relevan dengan situasi di Indonesia. Di dunia juga tidak relevan karena tiap negara Islam sekarang sudah berdiri sendiri-sendiri. Sudah tidak lagi menyatu, satu pemerintahan seperti di Turki Utsmani atau di zaman kekhalifahan. Saat ini negara-negara sudah berdiri sendiri-sendiri. Misal: Indonesia (umat Islam 80%), Brunei Darussalam, Malaysia. Negara-negara itu tidak bisa disatukan, untuk mengirim tentara saja tidak bisa. Harus ada aturan-aturannya. Kemudian, ingin masuk ke negara-negara saja. Ada aturannya. Tentu sangat berbeda dengan zaman dahulu.

B. Saran

1. Penting kiranya dalam menerapkan suatu ajaran apakah Islam mengajarkan dan menganjurkan atau tidak. Mengingat, Islam tidak pernah mengajarkan dan menganjurkan meng*kafir*kan sesama Muslim.
2. Cita-cita dari organisasi Khilafatul Muslimin sangat mulia. Namun, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada yang menjelaskan secara baku tentang

wajib tegaknya Negara Islam dalam wilayah tertentu. Hanya menjelaskan tentang kepemimpinan saja. Kemudian, cita-cita organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung tidak sejalan dengan otoritas pemerintah dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Ada baiknya, untuk saling bahu membahu menjaga hal itu menjadi lebih baik. Mengingat, baik dari pemimpin hingga jajaran penting bahkan keanggotaan organisasi Khilafatul Muslimin masih dalam lingkup kewarganegaraan Indonesia. Dimana itu menjadi tugas dari warga negara juga, dalam membantu menjalankan misi dari pemerintah melindungi dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- AF , Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus, *Islam, Negara & Civil Society* (Jakarta : Paramadina, 2005)
- Al-Hafidz,Ahsin W, “*Kamus Ilmu Al-Qur’an*”, (Jakarta : Amzah, 2012)
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Maqashid Syariah*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Anangkota, Muliadi“Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3 No. 2
- Arikunto, Suharmisi, *Prosedur Penelitian Lapangan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- , *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)
- Arsyad, Soeratno, Lincolin, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Stim Ykpn, 2008)
- AS, Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2MInstitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung,2015)
- Baraja, Abdul Qadir Hasan, *Gambaran Global Pemerintahan Islam*, (Bandar Lampung : Al Khilafah, 1435 H)
- , *Iman Hijrah Jihad*, (Bandar Lampung: Pustaka Al-Khilafah, Rajab 1434 H)
- , *Memilih Jama’ah Yang Benar*, (Bangil Jatim: Ud. Abda’u Jaya Bangil , 1437 H/ 2016)
- Budiono, “*Kamus Ilmiah Populer Internasional*”, (Surabaya : Alumni, 2005)
- Bahtiar,Wardi, *Metode Ilmu Dakwah*, (Jakarta ; Logos cet 1, 1997)
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2012)
- Cristhine dan Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2008)
- Fachruddin, Fuad M, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988)
- Hasan, M. Iqb, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)

- Haryanto, “*Makrullah Dalam Kemenangan Islam*”, (al-khilafah edisi 63, 1438 H)
- Hidayat, Sedermayati, Syarifudin, *Metode Penelitian* (Bandung : Mandar Maju, cet 1, 2002)
- Jaelani, Musthofa, *Mengenal Khilafatul Muslimin*, (Bandar Lampung : Pustaka Al-Khilafah, 2014)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)
- Lukman Surya Saputra, Aa Nurdiaman, dan Salikun, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)
- M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008)
- Nasution, Muhammad Iqbal, Amin Husein, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2002)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Rozak, A Ubaedillah, Abdul, *Pancasila., Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, 2015)
- Sugiyanto, Thoyib I.M, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002)
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)
- Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008)
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009)

Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)

Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012)

Tirtobisono, Yan dan Ekrom Z, “*Kamus Arab Inggris Indonesia*”, (Surabaya : Apollo Lestari, tt)

Thoyib I.M, Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002)

Wahid, Musthofa, Abdul, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)

Moh. Rizky Godzali, “Konsepsi Negara Islam menurut Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia dan Khilafatul Muslimin”. (Skripsi Program Sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012)

Ellyawati, “Khilafah Islamiyah dalam pandangan Hizbut Tahrir”. (Skripsi Program Sarjana Strata 1 Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003)

Ripyal Pahri, “Demokrasi; Pemilihan Umum dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi”. (Skripsi Program Sarjana Strata 1 Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

On-Line

“Dr Yusuf Al-Qaradhawi dan Demokrasi” (On-line), tersedia di: <https://almanhaj.or.id> (8 Mei 2019).

“ Fiqih Daulah Dr. Yusuf Qardhawi” (On-line), tersedia di: <https://alhikmah.ac.id> (8 Mei 2019).

“jagokata.com” (On-line), tersedia di: <https://jagokata.com/arti-kata/pandangan.html> (12 Januari 2019).

“Pancasila 14” (On-line), tersedia di: [sistem pemerintahan negara ri menurut uud 1945-Staff UNY PDFstaff.uny.ac.id >sites>files>pendidikan](http://sistem.pemerintahan.negera.ri.menurut.uud.1945-staff.uny.pdf) (13 Januari 2019).

“Perberlakuan teori-teori hukum Islam di Indonesia”. (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300> (12 Januari 2019)

“Tujuan Negara Indonesia” (On-line), tersedia di: ciputrauceo.net/blog/2016/3/14/k9r73tth3ootr1ut6d398dt7dicior (12 Januari 2019).

“Wajah lelah peserta diskusi Khilafah Usai penantian panjang” (On-line), tersedia di: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2018111780601-20-347371/wajah-lelah-peserta-diskusi-khilafah-usai-penantian-panjang> (21 Januari 2019)

Data pendukung

Kalender Khilafatul Muslimin 1439 H

Maklumat Terbentuknya Kembali Khilafah Islamiyah oleh Khilafatul Muslimin Tahun 1418 H/1997 M.

Perkembangan Kekholifahan Islam di Khilafatul Muslimin

Majalah Khilafatul Muslimin





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.
(0721)703260*

PANDUAN WAWANCARA / INTERVIEW

KANTOR PUSAT KHILAFATUL MUSLIMIN

1. Apa yang dimaksud dengan Khalifah?
2. Apa saja dasar-dasarnya?
3. Alasan khusus dalam memilih nama Khilafatul Muslimin (Khilafahnya Orang-orang Islam)?
4. Tujuan dari nama Khilafatul Muslimin?
5. Apa saja yang menjadi dasar dari Khilafatul Muslimin? Seperti ayat dan dalil-dalilnya.
6. Mengapa khilafah itu diperjuangkan?
7. Bagaimana cara memperjuangkannya?
8. Dalam hal kestruktural untuk Khilafatul Muslimin sendiri terdiri dari apa saja?
9. Ada tantangan tersendiri tidak dalam memperjuangkan sistem khilafah ini sedangkan sudah banyak negara yang telah menjadi Nation State (Negara Bangsa)?
10. Bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut?
11. Bagaimana pandangan bapak tentang Islam sebagai Ideologi Negara?
12. Bagaimana pandangan bapak tentang Pancasila (UUD 1945), Demokrasi dll?

13. Dalam pandangan bapak sebagai ketua umum/ pemimpin di Khilafatul Muslimin. Apa saja yang bisa dicapai dengan berdirinya Khilafah?
14. Apakah Khilafatul Muslimin termasuk Ormas (Organisasi Masyarakat) atau Partai Politik?
15. Indonesia sendiri sudah menetapkan UU (Undang-undang) tentang keormasan, Khilafatul Muslimin sendiri sudah terdaftar di dalam pemerintahan atau belum?
16. Cakupan wilayah Khilafatul Muslimin sendiri sudah merambah ke wilayah Internasional atau hanya di wilayah Indonesia saja? Untuk wilayah Internasional negara mana saja?
17. Untuk batas wilayahnya, wilayah mana saja?
18. Apakah batas-batas wilayah itu sudah diakui negara lain atau belum? Karena banyak wilayah atau negara yang sudah menjadi nation state (negara bangsa), dengan adanya Khilafatul Muslimin ini mengancam negara-negara tersebut atau tidak?
19. Bagaimana pandangan bapak tentang Khilafah Islamiyyah dan Penerapan Syariat Islam di Indonesia? Mengingat masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligion.
20. Bagaimana pandangan bapak tentang negara Islam?
21. Bagaimana Dinamika dan Perkembangan Khilafatul Muslimin di Indonesia sejak masuknya sampai sekarang?

22. Bagaimana pendapat Khilafatul Muslimin tentang perjuangan partai politik Islam lainnya yang juga memperjuangkan Islam dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
23. dan yang terakhir, bagaimana upaya Khilafatul Muslimin dalam menegakkan Khilafah Islamiyah di Negara Kesatuan Republik Indonesia?

